



SINERGI



BPIW sebagai Integrator Program di PUPR





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: hkkompu.bpiw@pu.go.id Telp. +6221-2751-5802

Tim Penyusun

Pengarah:

Rachman Arief Dienaputra

Penanggung Jawab:

Iwan Nurwanto

Penasihat:

Benny Hermawan

Hari Suko Setiono

Kuswardono

Manggas Rudy Siahaan

Pemimpin Redaksi:

Hari Suharto Diyaksa

Redaktur Pelaksana:

Tiara Titi Kartika

Staf Editor :

Indra Maulana

Azim Al Haqy Hakim

Hendra Djamal

Mutri Batul Aini

Fotografer:

Daris Anugrah

Sekretariat:

Untung Priyono

Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Desain Grafis:

Rasyid Pranawa

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Email: hkkompu.bpiw@pu.go.id,

Website: bpiw.pu.go.id

No. Telp. 0838-0874-7276

Pembaca yang terhormat.

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi BPIW sudah memasuki edisi 55, November–Desember 2021. Menutup lembaran tahun 2021, dihadirkan topik utama yang mengangkat tema mengenai *positioning* BPIW sebagai Integrator Program di Kementerian PUPR. Peran BPIW tersebut dibahas dalam rubrik Wawancara.

Rubrik Wawancara ini cukup spesial, karena menghadirkan para Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur di Tanah Air, yakni Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Ir. Jarot Widyoko Sp-1, Dirjen Bina Marga Dr.Ir.Hedy Rahadian,M.Sc., Dirjen Clpta Karya Ir. Diana Kusumastuti, M.T., dan Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, S.T., M.T.

Dari wawancara tersebut masing-masing memberikan masukan dan pemikirannya mengenai peran BPIW dan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Sedangkan rubrik Perspektif akan membahas mengenai tema utama terkait peran BPIW dalam perencanaan dan pemrograman di Kementerian PUPR.

Ada tiga orang yang menorehkan pemikirannya yakni Djuang Fadjar Sodikin, PhD, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Madya, Kementerian PUPR, Ir. Zevi Azzaino, M.Sc, PhD, Kepala Bidang Keterpaduan Program BPIW, dan Melva Eryani Marpaung, S.T, MUM, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A BPIW.

Dalam Warta BPIW mengangkat mengenai persiapan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Rubrik-rubrik reguler tetap mewarnai buletin edisi seperti Kilas Peristiwa, Plesiran, Bidik Lensa, Info Pengembangan wilayah, *Review*, Sorot dan BPIW Muda.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI



6



11

14



18

21



25



32



45



37

daftar isi

Edisi 55 November - Desember 2021

● **Topik Utama:**

BPIW sebagai Integrator Program di PUPR

Wawancara:

Ir. Jarot Widyoko, SP-1

Dirjen SDA

Dr.Ir.Hedy Rahadian,M.Sc.

Dirjen Bina Marga

● **Ir. Diana Kusumastuti, M.T.**

Dirjen Cipta Karya

Iwan Suprijanto, ST, MT

Dirjen Perumahan

● **Perspektif:**

Djuang Fadjar Sodikin, PhD

Mengawal Keterpaduan Program

● **Perspektif:**

Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM

BPIW Miliki Peran Penting dalam Pengembangan
Infrastruktur di Tanah Air

● **Sorot:**

Gelar Press Tour, BPIW Ajak Media Massa

Melihat Secara Langsung Pembangunan

Infrastruktur PUPR di Lombok

● **Info Pengembangan Wilayah:**

Melda Magiafitri

Menyambut ITMP Labuan Bajo: Dukungan Infrastruktur PUPR
dan Tantangan ke Depan



Koordinasi kolaborasi program antar unor di lingkungan Kementerian PUPR

Sumber: Kompu BPIW

BPIW sebagai Integrator dan Kolaborator Program di PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran yang penting dalam pengembangan infrastruktur bidang PUPR di Indonesia. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR bermula dari perencanaan yang dibuat BPIW. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun meminta BPIW berperan sebagai kolaborator dan integrator program di Kementerian PUPR.

Bagi Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, permintaan orang nomor satu di Kementerian PUPR itu merupakan tugas yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apalagi bila dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, BPIW harus bisa memerankan hal tersebut.

Untuk itu menurut Arief produk-produk BPIW harus diperkuat dengan analisis-analisis kebijakan yang kuat, sehingga bisa dipercaya dan bisa diikuti oleh unor-unor yang membangun infrastruktur yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan atau biasa disebut ABCP.

"Posisi BPIW harus kuat, dan mampu menjadi unit organisasi yang dipercaya di perencanaan dan program. BPIW harus berperan memadukan program infrastruktur dari teman-teman ditjen ABCP. Kita

berupaya agar program infrastruktur yang dibangun, memang berada kawasan yang menjadi prioritas, sehingga pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR benar-benar terlihat nyata dirasakan masyarakat dan bermanfaat," ujar Arief saat berbincang dengan SINERGI beberapa waktu lalu.

Dalam memadukan pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW melakukan koordinasi maupun kolaborasi baik dengan unor di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dan pemerintah daerah. Dalam mengimplementasikan koordinasi maupun kolaborasi tersebut, Arief terlebih dahulu meyakinkan unit eselon II di BPIW bahwa apa yang dilakukan itu merupakan tugas khusus yang diberikan pimpinan tertinggi Kementerian PUPR.

Dengan demikian menurut Arief, tugas khusus itu menjadi tugas pokok, apalagi tugas khusus itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPIW itu sendiri. "Itu

strategi yang kita terapkan agar koordinasi berjalan dengan baik. Kita harus memperkuat *positioning* BPIW agar Pak Menteri merasa kehilangan kalau BPIW tidak ada." ucapnya.

Branding BPIW Diperkuat

Guna mengoptimalkan pencapaian *output* BPIW dirumuskan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). RPIW bertujuan menterpadukan berbagai kebijakan spasial dan sektor ditingkat nasional dan daerah pada koridor pertumbuhan dengan koridor pemerataan (kawasan dan antar kawasan).

Muatan dokumen RPIW terdiri dari pendahuluan, arah kebijakan, sasaran dan target jangka panjang, profil wilayah, profil dan kinerja infrastruktur, isu strategis, skenario pengembangan, analisis kebutuhan, Rencana Aksi Pengembangan (Renaksibang) infrastruktur PUPR, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

"Dokumen RPIW ini menjadi bagian dari strategi kita, agar produk-produk yang dihasilkan BPIW menjadi produk yang kita yakini kebenarannya dan kualitasnya," ujar Arief. Untuk menjamin kualitas dari produk yang di hasilkan, dalam hal ini RPIW, maka dikeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala BPIW terkait standar produk RPIW, sehingga kajian yang dilakukan setiap pusat yang ada di BPIW pendekatannya tidak berbeda satu sama lain.

RPIW ini menjadi acuan bagi pusat dan bidang dalam memproduksi rencana pengembangan infrastruktur wilayah maupun kawasan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan dalam melakukan evaluasi atau melakukan identifikasi kebutuhan dalam hal pengembangan wilayah, tertuang dalam satu dokumen yang jelas. Diharapkan RPIW akan menjadi *branding* bagi BPIW.

Kenapa disebut *branding*?, karena menurut Arief, penamaan "RPIW" mirip dengan nama "BPIW". "Jadi akan mudah diingat banyak orang, bahwa BPIW produknya adalah RPIW. "Branding BPIW akan semakin kuat, bila kita bisa meyakinkan banyak kalangan bahwa produk BPIW itu merupakan produk yang berkualitas," ucap Arief.



Terjun langsung ke proyek Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.
Sumber : Kompu BPIW

Sebelum produk RPIW yang dihasilkan pusat-pusat di BPIW di *launching* atau dinyatakan diterima dan dapat dipergunakan *stakeholder*, pengesahan RPIW tersebut harus melalui supervisi "board of director" yakni Kepala BPIW, Sekretaris Badan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I hingga III.

"Kepala BPIW dan seluruh kepala pusat harus mendengarkan paparan masing-masing pusat terkait RPIW yang mereka rumuskan, sehingga mutunya bisa terjamin dan kita punya *Standard Operating Procedure* (SOP) juga untuk RPIW ini," ujar Arief. Selain ada pedoman itu, produk yang dibuat dievaluasi secara berkala. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas RPIW tersebut.

Sebelum diterapkan, konsep RPIW ini disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh insan BPIW, mulai dari pimpinan hingga staf. "Saya minta RPIW ini dijelaskan kepada pimpinan dan seluruh level yang ada, terutama staf-staf potensial. Hal ini perlu dilakukan supaya semua insan BPIW tahu konsep dari RPIW," kata Arief.

Setelah menghasilkan dokumen perencanaan dan pemrograman yang diproses melalui RPIW, maka



BPIW memfasilitasi kolaborasi Ditjen Cipta Karya dan Perumahan terkait percepatan penanganan kawasan kumuh di kota Mataram

Sumber : BPIW 2021

produk yang dihasilkan BPIW tersebut diinformasikan ke unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR terutama Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. "Dokumen perencanaan dan pemrograman kita itu, harus dilegalisasi oleh teman-teman ditjen, supaya dokumen kita diakui," ucapnya.

Koordinasi dengan Unor di Lingkungan Kementerian PUPR dan K/L Lain Terus Dilakukan

Koordinasi yang dilakukan BPIW dengan ditjen-ditjen ABCP tak terpaku pada jabatan, Arief pun tidak segan-segan untuk mendatangi pejabat eselon II terkait program langsung keruangan kerjanya masing-masing. Baginya yang terpenting perencanaan atau program yang dibicarakan tersampaikan dengan baik, terutama para direktur terkait perencanaan dan pemrograman di ditjen-ditjen tersebut.

"Saya ajak diskusi dan komunikasi mengenai bagaimana kita membuat strategi yang tepat terkait perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dan saya mendorong teman-teman pusat wilayah (puswil) supaya bisa memandu teman-teman ditjen terkait perencanaan dan pemrograman di wilayah masing-masing," tuturnya.

Koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan dengan ABCP tersebut, juga dilakukan dengan Kementerian/Lembaga (K/L). Hasilnya, ada beberapa produk

kolaborasi yang dihasilkan BPIW seperti *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, ITMP Danau Toba dan ITMP Lombok.

Produk berupa ITMP dihasilkan setelah BPIW menjalin komunikasi dengan Ditjen Bina Marga dan Cipta Karya. Tidak hanya dengan dua ditjen di lingkungan Kementerian PUPR tersebut, namun juga dengan K/L lain seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas. "Produk tersebut bisa menjadi sampel mengenai bagaimana kita melakukan kolaborasi," kata Arief lagi.

Koordinasi yang dilakukan Kementerian PUPR melalui BPIW dilakukan dalam "bingkai" Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang *kick off* nya sudah dilaksanakan pada 17 Desember 2021 lalu. Dalam *kick off* tersebut, BPIW mengundang Kementerian PPN/Bappenas. Arief menilai berkomunikasi dengan Bappenas perlu dilakukan karena Bappenas merupakan penjuror program nasional yang menyusun arah pembangunan Indonesia.

Selain itu, melalui dialog dengan Bappenas akan dapat diketahui harapan-harapan yang diinginkan kepada Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur.

Melalui pertemuan dengan Bappenas, BPIW dapat menyampaikan analisis-analisis yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur PUPR.

"Saya berkomunikasi dengan Bappenas mulai dari Deputi Regional hingga Deputi Sarana Prasarana, sehingga pada saat nanti kita membuat Rakorbangwil, kita sudah paham betul apa yang diinginkan Bappenas," kata Arief. Berbagai masukan Bappenas dalam pertemuan *kick off* Rakorbangwil itu akan disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan ditjen-ditjen ABCP.

Tidak hanya dengan Bappenas, melalui Rakorbangwil, komunikasi dijalin dengan K/L yang terkait infrastruktur seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, dll.

BPIW harus bisa memposisikan diri sebagai komunikator antar Ditjen Teknis di PUPR dengan Ditjen terkait di K/L lainnya.

"Sebagai contoh, Ditjen Bina Marga seringkali diminta membuat akses jalan ke pelabuhan yang

tidak diketahui Bina Marga sebelumnya, untuk itu BPIW diharapkan bisa menjadi penghubung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terkait dukungan infrastruktur Kementerian PUPR terhadap proyek nasional seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menurut Arief, arahan Menteri PUPR agar difokuskan pada lima dari 10 KSPN Super Prioritas. Kelima KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Dengan cara ini, maka anggaran infrastruktur lebih terarah dan ada fokus pekerjaan yang akan dicapai tidak diecer-ecer.

"Jadi harapan Pak Menteri, kita selesaikan dahulu penanganan lima KSPN Super Prioritas, baru kemudian pindah ke KSPN lain, karena kalau dibagi-bagi berapa titik, maka tidak selesai-selesai. Diharapkan BPIW bisa melakukan fungsi sebagai kolaborator dan integrator dalam menangani lima KSPN Super Prioritas tersebut," tambah Arief.

Guna memaksimalkan fungsi sebagai kolaborator dan integrator, menurutnya BPIW juga harus terus melakukan komunikasi dengan pihak diluar ABCP di Kementerian PUPR, misalnya dengan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri untuk mengetahui isu-isu terkini, sehingga



Kepala BPIW saat memimpin Kick-off RAKORBANGWIL Bidang PUPR

Sumber : Kompu BPIW

perencanaan yang dibuat lebih dinamis, karena mengikuti perkembangan yang ada.

"Kita juga harus ikut setiap forum diskusi terkait pembangunan, karena BPIW punya banyak waktu untuk belajar dan berkomunikasi dengan banyak pihak. BPIW harus memosisikan diri sebagai lembaga yang bermanfaat dan membuat keberadaan BPIW benar-benar diperlukan," tegasnya.

BPIW Muda Dipersiapkan Menjadi *Planner* dan *Programmer* yang Andal

Sebagai pimpinan yang diberi tanggung jawab penuh menangani BPIW, Arief ingin menjadikan BPIW sebagai lembaga yang bermanfaat bagi instansi lain. Untuk mewujudkan hal itu, salah satu yang dilakukannya adalah mengadakan pertemuan khusus dengan generasi muda BPIW, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk mempersiapkan para generasi muda BPIW menjadi *planner* dan *programmer* yang andal.

"Ketika membuat perencanaan dan program, mereka juga harus memahami tugas dan program dari unor-unor sampai detail. Selain itu, saya juga minta ke Pak Sekretaris BPIW untuk kurikulum maupun metodologi



*Saat memberikan arahan kepada generasi muda BPIW
Sumber : Kompu BPIW*

pelatihan yang dibuat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk generasi muda, harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan BPIW," pintanya.

Ia pun "menantang" Puswil 1 hingga 3 untuk menghasilkan minimal satu produk yang benar-benar dimatangkan dari sisi perencanaan dan programnya. Bila dokumen RPIW dari produk itu sudah jadi, maka Arief memastikan dirinya yang akan membawa produk tersebut ke ditjen ABCP untuk direalisasikan. "Saya optimis produk BPIW bisa direalisasikan, dengan adanya dukungan dari Bapak Menteri PUPR," ujarnya.

Arief juga berharap dapat meningkatkan kinerja BPIW, sehingga dapat mencapai harapan dari Menteri PUPR. "Insan BPIW harus kompak mulai dari jajaran pimpinan hingga pegawai junior. Selain itu semua pegawai harus dapat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional pada berbagai level. **(Redaksi)**



*Jajaran BPIW melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Karian, Banten.
Sumber : Kompu BPIW*

Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Wilayah Sungai Memerlukan Peran BPIW



Ir. Jarot Widyoko, SP-1

Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian PUPR

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Ditjen SDA tidak dibatasi wilayah administrasi, tapi dibatasi wilayah sungai. Guna mengoptimalkan *output* dan *outcome* pembangunan infrastruktur berbasis sungai tersebut, Direktur Jenderal SDA Ir. Jarot Widyoko SP-1 menilai peran BPIW sangat diperlukan, terutama untuk menterpadukan perencanaan dan pemrograman yang ada di Ditjen SDA dengan unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Untuk lebih jelasnya terkait hal itu dan hal-hal lain, simak wawancara lengkapnya berikut ini.

Bagaimana Bapak melihat kiprah BPIW selama 2015 – 2021 dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah?

Peran BPIW didalam perencanaan dan pemrograman sangatlah penting. Kenapa?, karena ini merupakan tugas memadukan dan mensinergikan pembangunan infrastruktur. Tanpa itu, hasil *output* dan *outcome* tidak optimal. Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Ditjen SDA berbasis wilayah sungai, sehingga hal ini sangat diperlukan. Apalagi pengembangan wilayah itu bisa membangun baru atau menambah luasan. Selama ini Direktorat Jenderal atau Ditjen SDA dan BPIW sudah berkolaborasi dan bekerja sama. Kedepan, kerja sama dengan BPIW akan kami tingkatkan lagi.

Sebagai Direktur Jenderal SDA, Bagaimana perspektif Bapak terhadap peran pengembangan wilayah dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur SDA?

Dalam menghadapi tantangan infrastruktur Ditjen SDA kedepan, peran BPIW sangat penting. Ini saya garis bawahi, bahwa pengembangan wilayah dalam konteks sungai tidak dibatasi oleh batas administrasi, tetapi batas wilayah sungai. Sehingga pola dan rencana menjadi faktor penting untuk pondasi dalam pengembangan suatu wilayah. Kita tahu bahwa didalam wilayah sungai tugas Ditjen SDA ada tiga.

Pertama, pendayagunaan, kedua konservasi, dan ketiga pengendalian daya rusak air. Namun saya bisa memahami bahwa untuk memajukan suatu wilayah tidak mudah, karena banyak faktor, apalagi *stakeholder* yang terkait banyak. Ini merupakan tantangan kedepan.

Banyak hal yang diinisiasi BPIW yang dilakukan bersama unor di Kementerian PUPR serta K/L lain yang menghasilkan produk perencanaan, seperti *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan, ITMP Danau Toba, dan ITMP Lombok. Bagaimana Bapak melihat produk – produk kolaborasi yang diinisiasi BPIW tersebut?*

Hal ini merupakan suatu contoh koordinasi dan kolaborasi yang sangat bagus. Ditingkat Kementerian PUPR, BPIW sudah berperan dalam perencanaan dan pemrograman. Kami berharap kedepan, *basic data* atau *big data* agar ditingkatkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan bagi semua unor. Ditjen SDA akan menyiapkan pola dan rencana pembangunan infrastruktur sektor SDA, dan akan kami sampaikan kepada BPIW, karena ini akan menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan suatu wilayah.

Kami memahami bahwa dalam mengembangkan suatu wilayah tidak hanya Ditjen SDA, tapi ada ditjen lain seperti Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Direktorat lain di lingkungan Kementerian PUPR juga punya peran penting dalam pengembangan wilayah. Diluar Kementerian PUPR ada peran dari K/L, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, peran masyarakat di wilayah sekitar, juga penting. Hal-hal seperti ini yang perlu ditingkatkan.

Kedepan, kerja sama antar instansi tersebut diperkuat, tidak hanya dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur, tapi juga dengan *action plan*. Untuk itu kapasitas Sumber Daya Manusi (SDM) perlu terus ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur PUPR memberikan dampak pertumbuhan perekonomian nasional dan manfaat bagi masyarakat. BPIW sebagai integrator program di PUPR berusaha untuk selalu update dan berinovasi dalam perencanaan dan pemrograman. Apa yang harus dilakukan BPIW untuk senantiasa



*Dirjen SDA Jarot Widyoko didampingi Direktur Bendungan dan Danau Airlangga Mardjono saat meninjau Bendungan Sadawarna
Sumber: Ditjen SDA*



*Dirjen SDA Jarot Widyoko saat meninjau dukungan infrastruktur terkait Food Estate Kalimantan. Tengah
Sumber: Ditjen SDA*



*Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang Jabar
Sumber: Ditjen SDA*

mampu mengakselerasi perencanaan dan pemrograman bidang PUPR?

Jadi kita tahu bahwa beberapa dekade terakhir ini, akselerasi pembangunan infrastruktur secara umum di Indonesia sangat cepat sekali. Pembangunan ini diikuti perkembangan di wilayah yang akan menjadi pengembangan khusus, sehingga masyarakat akan ikut menikmati pengembangan atau pembangunan infrastruktur yang ada di wilayahnya. Apa yang harus kita lakukan?, kita perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi.

Kita tahu bahwa koordinasi mudah diucapkan, tetapi realisasi biasanya sulit dilaksanakan. Terkait hal ini, maka yang harus kita lakukan adalah koordinasi dan *action plan* di lapangan. Kita juga harus melakukan keterpaduan dan sinergi didalam pembangunan tersebut, termasuk keseimbangan di wilayah yang akan kita kembangkan. Lalu, kita perlu meningkatkan basic data dengan cara melakukan *update* data.

Kita tahu bahwa teknologi komputer atau teknologi informasi sangat cepat perkembangannya. Kita bisa mengetahui perkembangan di suatu daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam perencanaan dan pemrograman juga perlu menerapkan teknologi informasi ini, sehingga Informasi detail dan terkini, bisa kita sampaikan ke BPIW untuk menjadi dasar perencanaan dan pemrograman kedepan.

Kami tahu bahwa ini tidak mudah, namun hal itu diperlukan untuk mendukung komunikasi saat kita melakukan sinkronisasi dan sinergitas dalam hal pengembangan wilayah dengan melibatkan banyak pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, masyarakat, dan swasta. Hal ini menjadi dasar pengembangan atau dasar perencanaan dan pemrograman yang harus dan wajib kita lakukan.

Harapan terhadap BPIW ke depannya sebagai integrator program di Kementerian PUPR?

Kami sangat berharap sekali BPIW semakin masuk kedalam kegiatan kami di Ditjen SDA. Kami memiliki kurang lebih 128 wilayah sungai yang tersebar dari



Sabang sampai Merauke. Masing-masing wilayah punya rencana dan pola sendiri-sendiri dan disetiap titik-titik dibatasi administrasi. Namun kami tidak terbatas pada wilayah administrasi, namun pada wilayah sungai.

Saya melihat bawa keterpaduan dan koordinasi dari hulu sampai hilir merupakan salah satu dasar dalam pengembangan wilayah sungai. Tidak hanya dengan BPIW, hal itu perlu dilakukan dengan unor-unor terkait. Kami juga berharap, pembangunan, perkembangan, dan termasuk pengendalian sungai di Indonesia, juga harus diperhatikan kedepan.

Kita tahu bahwa pembangunan ada dampak, baik positif maupun negatif. Dampak negatif ini yang harus kita tanggulasi seminimal mungkin, agar pembangunan infrastruktur benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Harapan lain kami baik di Ditjen SDA maupun BPIW adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cepat tanggap dan mumpuni dalam segala hal, termasuk melakukan inovasi dan merespon dengan cepat segala sesuatu yang akan terjadi.

Kami mengapresiasi kepada jajaran BPIW yang selama ini sudah berkolaborasi dengan Ditjen SDA dalam hal perencanaan dan pemrograman suatu wilayah dan saya yakin kedepan akan menjadi lebih baik lagi. InsyaAllah kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas-tugas yang kita jalankan. (Hendra)

Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Perlu Dikolaborasikan



Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.

Direktur Jenderal Bina Marga
Kementerian PUPR

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memberi nilai tambah (*added value*) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara memberikan *added value* itu dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat bergerak sendiri, perlu adanya sinergitas atau kolaborasi dengan instansi yang menangani infrastruktur lainnya. BPIW memiliki peran untuk melakukan hal itu. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc. kepada Buletin Sinergi BPIW beberapa waktu lalu. Berikut wawancara selengkapnya.

Bagaimana Bapak melihat kiprah BPIW selama 2015 – 2021 dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah?

BPIW telah berperan cukup aktif dalam tahap pemrograman awal yaitu pada kegiatan Konsultasi Regional (Konreg), Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil), serta Rapat Koordinasi Teknis (Rakor tek). BPIW memiliki peran untuk mengintegrasikan atau menyelaraskan program antar unor di lingkungan Kementerian PUPR terutama Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, serta dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.

Selanjutnya BPIW juga memberikan pandangan dari sisi pemerintah daerah terkait kebutuhan infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Pengembangan wilayah ini seyogyanya juga dapat mengakomodir Rencana Tata Ruang yang telah disusun oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sehingga peran BPIW menjadi *'bumper'* dalam menentukan prioritas program dapat dilakukan secara komprehensif, seperti memberikan *insight* manfaat usulan yang dibahas dari sisi pengembangan wilayah. Konreg (yang dulu diselenggarakan BPIW, red) dan Rakorbangwil yang dilaksanakan oleh BPIW,



Jalur Pansela, Pacitan

Sumber: Ditjen Bina Marga

menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan adanya kegiatan tersebut, memudahkan pemerintah daerah dalam mengusulkan program-program pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Akan tetapi, perlu dilakukan kajian kewilayahan terlebih dahulu oleh BPIW dan dikoordinasikan dengan unor sebelum pembahasannya dilaksanakan bersama pemerintah daerah ataupun K/L lainnya, sehingga sudah ada satu kesepahaman antara unor dan BPIW, mengingat bahwa setiap unor memiliki kebijakan/koridor dalam penentuan program prioritas.

Sebagai Direktur Jenderal Bina Marga, Bagaimana perspektif Bapak terhadap peran pengembangan wilayah dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur Bina Marga?

Beberapa tantangan dan permasalahan pembangunan jalan dan jembatan di Indonesia seperti permasalahan pengadaan tanah, hambatan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai pinjaman luar negeri, pemotongan dan realokasi anggaran, kondisi geografis yang berpengaruh pada biaya konstruksi, *backlog* anggaran, serta kualitas penyedia jasa yang berbeda-beda di tiap daerah. Pengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan pihak terkait (*stakeholders*) di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya dengan teknologi agar memberi nilai tambah (*added value*), atas apa yang dimiliki oleh wilayah administratif/wilayah fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu cara memberikan *added value* dalam pengembangan wilayah yaitu dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini bertujuan

untuk memperlancar pergerakan arus barang dan jasa, baik di dalam maupun dari/ke luar suatu wilayah. Namun demikian, pembangunan jalan dan jembatan tidak dapat bergerak sendiri.

Perlu adanya sinergi atau kolaborasi dengan infrastruktur dasar lainnya serta pertumbuhan pusat – pusat kegiatan baru sehingga manfaat dari pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

Banyak hal yang diinisiasi BPIW yang dilakukan bersama unor di Kementerian PUPR serta K/L yang kemudian menghasilkan produk perencanaan, seperti *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan, ITMP Danau Toba, dan ITMP Lombok. Bagaimana Bapak melihat produk – produk kolaborasi yang diinisiasi BPIW tersebut?

Sinergi atau kolaborasi terkait pembangunan infrastruktur guna mencapai tujuan pengembangan wilayah merupakan tugas besar yang diemban oleh BPIW dan BPIW sebagaimana fungsinya sebagai penyusun kebijakan teknis, rencana terpadu, pelaksana koordinasi dan sinkronisasi program, serta pemantau dan *evaluator* pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR sudah seyogyanya memiliki potret besar akan dibawa kemana pembangunan infrastruktur PUPR tidak hanya lima tahun ke depan melainkan sampai 20 bahkan hingga 25 yang akan datang.

Pengembangan infrastruktur di sini bukan berarti semua infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan suatu wilayah harus dilaksanakan oleh Kementerian



Pansela Jogja

Sumber: Ditjen Bina Marga

PUPR. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, misal dalam hal pembangunan jalan dan jembatan, terdapat UU No. 38 Tahun 2004 serta PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang menjadi koridor dalam penyelenggaraan jalan jalan jembatan.

Selain itu, pembagian kewenangan penyelenggaraan infrastruktur juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana masing – masing level pemerintahan mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kota/kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan sesuai dengan statusnya.

Sebagai instansi pembina bidang infrastruktur, Kementerian PUPR berfungsi membina pemerintah daerah, bukan mengambil alih pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal inilah yang sering kali luput dari kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh BPIW. Terkait ITMP, perlu diperkuat sebagai peraturan perundang-undangan agar bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan infrastruktur di wilayah kajian *master plan* tersebut.

Dewasa ini telah dikembangkan beberapa skenario pendanaan alternatif selain APBN dan APBD salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), sehingga hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyusunan skenario pendanaan ITMP.

Pembangunan infrastruktur PUPR memberikan dampak pertumbuhan perekonomian nasional dan manfaat bagi masyarakat. BPIW sebagai integrator program di PUPR berusaha untuk selalu update dan berinovasi dalam perencanaan dan pemrograman. Apa yang harus senantiasa dilakukan oleh BPIW untuk senantiasa mampu mengakselerasi perencanaan dan pemrograman bidang PUPR?

BPIW menginisiasi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM). Perlu diketahui kedudukan RPIJM dalam proses perencanaan infrastruktur yang ada di Kementerian PUPR, mengingat perencanaan perlima tahunan telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

RPIJM diharapkan menjadi koridor pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur dengan tetap mengacu pada arahan tata ruang dan kebijakan yang ada di dalam Renstra PUPR. Selain itu, RPIJM perlu ditetapkan sebagai produk hukum, sehingga dapat menjadi dasar bagi unor dalam melakukan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah.

Sesuai amanat dari PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Ditjen Bina Marga sedang Menyusun Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional (RUJPJN) dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional (RUJMJJN). Dalam penyusunannya, BPIW selalu diikuti sertakan, sehingga rencana ini nantinya

selaras dengan konsep pengembangan wilayah yang ada di BPIW.

Saat RUJPPJN dan RUJMJJN telah disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri PUPR (Kepmen PUPR), agar koridor pengembangan jaringan jalan dapat merujuk pada Kepmen tersebut. Adapun proses perencanaan dan pemrograman di Ditjen Bina Marga menggunakan *tools Indonesia Road Management System (IRMS V3)* untuk menghasilkan perencanaan dan pemrograman dengan prinsip efektif dan efisien.

Pada bidang jalan dan jembatan, agar *tools* yang digunakan oleh BPIW dapat diintegrasikan dengan IRMS V3 tersebut. Selain itu, hasil – hasil studi yang dihasilkan oleh BPIW dapat diformulasikan untuk menjadi data *input* bagi IRMS V3, sehingga pendekatan perencanaan dan pemrograman yang ada di Ditjen Bina Marga berbasis kewilayahan.

Begitu juga dengan aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Konreg / Rakorbangwil dapat diintegrasikan dengan aplikasi pemrograman yang ada di Ditjen Bina Marga yaitu SITIA untuk menghindari ketidakkonsistenan data yang di *input* oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing unor.

Harapan terhadap BPIW ke depannya sebagai integrator program di Kementerian PUPR?

Adanya *backlog* anggaran sebagai dampak dari gap antara kebutuhan anggaran dengan alokasi riil, pemotongan dan realokasi anggaran, serta kondisi geografis Indonesia yang berpengaruh pada biaya

konstruksi membutuhkan strategi dalam penentuan prioritas serta pentahapan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan. Peran BPIW sangat dibutuhkan dalam tahapan ini, karena tidak dapat dipungkiri sumber daya yang dimiliki oleh negara terbatas, sementara pembangunan yang perlu dilaksanakan masih sangat banyak.

Ada pepatah yang menyebutkan “perencanaan yang paling baik bukanlah perencanaan yang paling ideal dan mengakomodir semua keinginan *stakeholder*, akan tetapi perencanaan yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat”.

Harapan dari Ditjen Bina Marga, paradigma pengembangan wilayah di BPIW tidak hanya menghasilkan produk perencanaan yang ideal, akan tetapi menghasilkan produk perencanaan terintegrasi yang dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya langsung untuk sebesar – besar kesejahteraan masyarakat.

Mengingat banyaknya arahan dan kebijakan peraturan perundang-undangan sektor infrastruktur yang belum terakomodir di dalam Renstra unor yang memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, BPIW diharapkan dapat menjadi “wasit” bagi unor-unor di lingkungan PUPR dan *‘bumper’* bagi Kementerian PUPR dalam menghadapi pihak luar seperti K/L lainnya serta pemerintah daerah. Hal ini penting, agar unor dapat menjalankan arahan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memenuhi target pembangunan yang telah tertuang dalam Renstra. **(Hendra)**



Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian (kanan) saat meninjau tol Balsam Seksi 5

Sumber: Ditjen Bina Marga

BPIW Diharapkan Lebih Responsif sebagai Langkah Adaptasi terhadap Situasi dan Kondisi Terkini



Ir. Diana Kusumastuti, M.T.
Direktur Jenderal Cipta Karya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya sebagai salah satu sektor di Kementerian PUPR, memiliki tugas melaksanakan penataan kawasan serta pembangunan infrastruktur permukiman pendukungnya, seperti air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk. Dalam menjalankan tugasnya Ditjen Cipta Karya membutuhkan analisis dan perencanaan terpadu yang merupakan tugas BPIW. Seperti apa harapannya terhadap BPIW? Berikut wawancara Buletin Sinergi BPIW dengan Dirjen Cipta Karya, Ir. Diana Kusumastuti, M.T.

Bagaimana Ibu melihat kiprah BPIW selama 2015-2021 dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah?

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah melaksanakan tugas sesuai fungsinya dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pada tahun 2015-2021. Kegiatan yang memerlukan peran sentral BPIW diantaranya pelaksanaan Konreg Kementerian PUPR, yang merupakan proses koordinasi dan sinkronisasi secara sektoral dan kewilayahan. Selain itu, untuk menjalankan tugas pelaksanaan *Major Project* Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, peran BPIW dibuktikan dengan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (TMP) yang mengarahkan dan menjadi acuan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Bagaimana perspektif Ibu sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya terhadap Peran Pengembangan Wilayah dalam menghadapi Tantangan Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya?

Pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan pembangunan yang berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang. Arahan Bapak Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwa pembangunan infrastruktur permukiman harus direncanakan secara terpadu dari konektivitas regional, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi,



Menteri PUPR dan Dirjen Cipta Karya meninjau penghijauan jalan Bypass BILL - Mandalika

Sumber: Ditjen SDA

hingga perbaikan hunian penduduk, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial, dan ekonomi. Selain Ditjen Cipta Karya yang bertugas menyusun perencanaan dan desain kawasan, Ditjen Bina Marga bertugas membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar simpul aktivitas. Ditjen Sumber Daya Air bertugas memastikan dukungan air baku, infrastruktur pengendali banjir, dan antisipasi daya rusak air, serta Ditjen Perumahan yang bertugas membangun sarana hunian.

Pembangunan infrastruktur Cipta Karya dilaksanakan melalui penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur permukiman pendukungnya. Terdapat koordinasi yang kompleks di masing-masing lokasi, terutama pada kawasan-kawasan strategis nasional, contohnya di Kawasan Labuan Bajo dan di Kawasan Bunaken Manado, perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait lahan pelabuhan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait lahan Taman Nasional.

Kemudian, pada Kawasan 3 Gili perlu koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kawasan perairan nasional. Secara umum, penataan kawasan membutuhkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan pemilik lahan setempat untuk mempercepat dimulainya kegiatan konstruksi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur pemukiman yang sudah ada, berada dalam kondisi fungsional, berkontribusi meningkatkan

kondisi perekonomian masyarakat dan dapat dinikmati manfaatnya secara berkelanjutan.

Banyak hal diinisiasi BPIW yang dilakukan bersama Unit organisasi (Unor) di Kementerian PUPR serta K/L yang kemudian menghasilkan produk perencanaan, seperti *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, ITMP Danau Toba, dan ITMP Lombok. Bagaimana Ibu melihat produk-produk kolaborasi yang diinisiasi BPIW tersebut?*

Pengembangan pariwisata merupakan pengembangan multi-sektor dan multi entitas. Sebelum ITMP telah banyak dokumen perencanaan tata ruang dan pariwisata kawasan yang telah disusun, namun berbagai dokumen tersebut belum terintegrasi satu dengan lainnya, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata. ITMP dalam hal ini mencoba mengintegrasikan berbagai rencana pariwisata sektoral ke dalam dokumen komprehensif dari lingkup makro hingga mikro. Dalam konteks pariwisata, berbicara tentang destinasi wisata, tidak dapat dipisahkan dari posisi daerah tersebut sebagai pusat aktivitas untuk daerah sekitarnya, atau posisinya terhadap destinasi wisata lainnya. Dengan demikian, dalam hal perencanaan, rencana pengembangan pariwisata harus disusun dengan mempertimbangkan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan wilayah terpadu yang perlu terintegrasi secara fisik dan non-fisik



Menteri PUPR dan Dirjen Cipta Karya meninjau penghijauan jalan Bypass BILL - Mandalika

Sumber: Birkom PUPR

Pembangunan infrastruktur PUPR memberikan dampak pertumbuhan perekonomian nasional dan manfaat bagi masyarakat. BPIW sebagai integrator program di PUPR berusaha untuk selalu *update* dan berinovasi dalam perencanaan dan pemrograman. Apa yang harus senantiasa dilakukan BPIW untuk mengakselerasi perencanaan dan pemrograman bidang PUPR?

Dalam rangka memperkuat peran infrastruktur PUPR agar memberikan dampak bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan manfaat bagi masyarakat, BPIW dapat melakukan inovasi dalam hal Analisis Penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan metode seperti *Cost Benefit Analysis*, yaitu analisis yang membandingkan antara penggunaan sumber daya dibandingkan dengan nilai manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap infrastruktur terbangun, menetapkan kegiatan prioritas, serta nilai alokasi dan sumber daya yang tepat untuk pekerjaan itu.

Harapan Ibu terhadap BPIW kedepannya sebagai integrator program di Kementerian PUPR?

Dalam perkembangan situasi yang berubah secara cepat, diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan mendesak tersebut. Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan fokus pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR), selain bertugas memenuhi target pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, juga diharapkan dapat merencanakan infrastruktur dalam waktu yang singkat sesuai kebutuhan yang mendesak.

Dalam hal ini, BPIW sebagai penjuror diharapkan untuk lebih responsif dalam menyusun perencanaan dan pemrograman yang mengarahkan pembangunan seluruh infrastruktur PUPR sebagai langkah adaptasi terhadap situasi dan kondisi terkini.**)



Pasar Besar Ngawi yang di bangun Ditjen Cipta Karya dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi bulan Desember lalu.

Sumber: Birkom PUPR 2021

BPIW adalah Integrator Unit Organisasi Kementerian PUPR sekaligus Connector dengan Stakeholder Lain



Iwan Suprijanto, ST, MT
Direktur Jenderal Perumahan

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 13 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai tugas dan fungsi antara lain, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan perumahan akan lebih termudahkan dengan hadirnya yang kajian-kajian BPIW. Berikut wawancara sinergi BPIW dengan Iwan Suprijanto, ST, MT, beberapa waktu lalu.

Bagaimana Bapak melihat kiprah BPIW selama 2015-2021 dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah?

Dalam pandangan saya, BPIW merupakan integrator antar unit organisasi dalam Kementerian PUPR sekaligus *connector* dengan *stakeholder* lainnya dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR. Peran ini sangat strategis karena dapat memastikan pengalokasian *resources* PUPR secara efisien untuk mewujudkan infrastruktur yang handal, mampu mendukung upaya pengembangan ekonomi nasional, serta melayani aktivitas masyarakat.

Dalam konteks perencanaan dan pemrograman, kajian-kajian berbasis kewilayahan yang disusun oleh BPIW pada periode tahun 2015 - 2021 seperti Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (RIPI), *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) serta *master plan* kawasan strategis menjadi salah satu acuan kami dalam menentukan lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan bantuan perumahan. Hanya saja, menurut kami rekomendasi pengembangan kewilayahan yang disusun oleh BPIW sebaiknya disusun dengan memperhatikan skenario pesimis-moderat-optimis sehingga timing penyediaan infrastruktur ke-PUPR-an tetap seiring dengan pertumbuhan wilayah secara nyata di lapangan.

Lebih lanjut, forum perencanaan tahunan seperti pra-konreg atau rakorbangwil yang diselenggarakan BPIW juga cukup efektif dan membantu kami di Ditjen



Program Sejuta Rumah Tetap Dilanjutkan Kementerian PUPR

Sumber: Ditjen Perumahan

Perumahan untuk mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan bantuan perumahan dengan pengembangan infrastruktur permukiman oleh Ditjen Cipta Karya, dan memastikan kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan Daerah. Sementara itu, jika dilihat dari sisi sistem informasi perencanaan, aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) yang merupakan instrumen pengusulan bantuan perumahan juga telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) yang dikelola oleh BPIW.

Perspektif sebagai Direktur Jenderal Perumahan terhadap Peran Pengembangan Wilayah dalam menghadapi Tantangan Pembangunan Infrastruktur Perumahan?

Bagi saya, tantangan pembangunan infrastruktur perumahan sangat dinamis dan kompleks yaitu keterpaduan penanganan dan pembinaan daerah, kebutuhan pemenuhan pembangunan hunian dengan berbagai pendekatan dan sasaran seperti pemenuhan hunian bagi kaum milenial, penerapan *housing career* dalam pemenuhan penyediaan hunian, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi/TOD, pembangunan rumah skala besar dan hunian berimbang, pemenuhan kebutuhan rumah ASN, TNI/Polri, dan pemenuhan perumahan berbasis komunitas dan kelompok. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentu dibutuhkan keterpaduan perencanaan

dan pemrograman yang berorientasi terhadap pengembangan wilayah. BPIW berperan penting dalam menghasilkan kajian makro dan komprehensif yang bermanfaat bagi Ditjen Perumahan untuk mendapatkan informasi awal dalam menentukan prioritas penanganan.

Idealnya, perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada kebutuhan akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sesuai amanat Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Perumahan memiliki dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. RP3KP ini digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang PKP, khususnya perumahan yang layak huni. RP3KP ini memuat program dan kegiatan jangka pendek (setiap tahun), menengah (tiap 5 tahunan), dan panjang (tiap 20 tahun). RP3KP menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya bidang PKP. Hingga saat ini, sebesar 79,4% provinsi dan 56,3% kabupaten/kota telah menyusun RP3KP.

Dalam konteks perencanaan, RP3KP merupakan *grand design* bidang PKP yang berupa satu kesatuan sistem perencanaan yang terkoordinasi, terpadu dan

berkelanjutan sehingga muatannya bersifat *vice versa* bagi dokumen perencanaan dan pemrograman bidang lainnya. Jika tercipta integrasi yang baik diantaranya, tentu tantangan pembangunan infrastruktur akan lebih terkendali. Salah satu contoh yang sedang berjalan saat ini, yaitu inisiasi kolaborasi program antara Direktorat Jenderal Perumahan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan hal yang cukup strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting*, mengingat pendekatan program harus multi dimensi khususnya dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman.

Banyak hal diinisiasi BPIW yang dilakukan bersama unit organisasi ITMP Danau Toba, dan ITMP Lombok. Bagaimana Bapak melihat produk-produk kolaborasi yang diinisiasi BPIW tersebut?

Kami di Ditjen Perumahan sangat mendukung upaya pengembangan pariwisata, terutama pada destinasi wisata super prioritas yang strategi pengembangannya dimuat dalam dokumen *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP). Upaya pengembangan pariwisata selain memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga mampu menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola oleh masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Untuk mendukung pengembangan destinasi wisata super prioritas, pada tahun 2020, kami melaksanakan pembangunan *homestay* (sarana hunian pariwisata/ Sarhunta) sebanyak 4.679 unit dengan anggaran Rp. 353,27 M yang tersebar di Danau Toba, Borobudur,

Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Sementara pada tahun 2021, kami mengalokasikan anggaran Rp. 46,5 M untuk melaksanakan pembangunan 900 unit Sarhunta di Tanjung Kelayang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai dan Raja Ampat.

Dalam konteks penyelenggaraan pengembangan pariwisata di lokasi destinasi super prioritas, kami yakin dokumen ITMP dapat dimanfaatkan sebagai acuan para *stakeholders* untuk memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, sebagai media untuk mengintegrasikan kegiatan pembangunan, serta instrumen pengendalian pengembangan destinasi pariwisata.

Pembangunan infrastruktur PUPR memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional dan manfaat bagi masyarakat. BPIW sebagai integrator program di PUPR berusaha untuk selalu *update* dan berinovasi dalam perencanaan pemrograman. Apa yang harus senantiasa dilakukan BPIW agar mampu mengakselerasi perencanaan dan pemrograman bidang PUPR?

Menurut saya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan BPIW untuk memastikan agar proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur ke-PUPR-an mampu mendukung pengembangan ekonomi nasional dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pertama, BPIW perlu sangat sensitif memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap jenis dan kapasitas



Menteri PUPR ketika mengunjungi Sarhunta KSPN Mandalika

Sumber: Birkom PUPR



Iwan Suprijanto bersama jajaran pejabat Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR setelah dilantik menjadi Dirjen Perumahan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.

Sumber: Dirjen Perumahan

infrastruktur yang harus disediakan oleh Kementerian PUPR, serta mengkomunikasikan kebutuhan tersebut dengan unit organisasi terkait di Kementerian PUPR atau dengan K/L terkait lainnya.

Kedua, BPIW perlu segera menyelesaikan rumusan *roadmap* penyediaan infrastruktur ke-PUPR-an untuk jangka menengah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pengembangan wilayah pertumbuhan baru, serta upaya pemerataan pembangunan antar wilayah. Tingkat kedetailan *roadmap* yang disusun oleh BPIW sebaiknya cukup hingga level kebijakan dan strategi, untuk selanjutnya diterjemahkan oleh masing-masing unit organisasi dalam bentuk rincian program dan anggaran.

Terakhir, BPIW harus memiliki sistem informasi yang berfungsi sebagai *dashboard* pemantauan dan pengendalian kontribusi masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah prioritas pembangunan nasional, wilayah yang memiliki fungsi strategis ekonomi dan pertahanan, serta isu tematik tertentu yang menjadi perhatian pimpinan nasional. Sistem informasi ini sebaiknya dapat diakses oleh para *stakeholders* terkait sehingga juga mampu mengintegrasikan data dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh *stakeholders* tersebut, baik sektor pemerintah maupun non-pemerintah

Sebagai Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, apa harapan Bapak terhadap BPIW kedepannya dalam kaitan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah?

Sebagai Direktur Jenderal Perumahan, saya memiliki harapan yang besar terhadap BPIW untuk mampu menyediakan informasi yang akurat terkait kebutuhan penyediaan infrastruktur perumahan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat, mampu mengkolaborasi kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan dengan kegiatan penyediaan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, mampu mengintegrasikan kegiatan penyediaan perumahan yang kami laksanakan dengan prioritas pemanfaatan skema pendanaan/pembiayaan non-APBN yang dikembangkan oleh DJPI, serta mampu menjadi mediator untuk mengoptimalkan kolaborasi antara Ditjen Perumahan dengan *stakeholders* diluar lingkungan Kementerian PUPR dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perumahan. (**)

MENGAWAL KETERPADUAN PROGRAM



oleh:

Djuang Fadjar Sodikin, PhD

Pejabat Fungsional Penata Ruang
Ahli Madya, Kementerian PUPR

Januari 2015 menjadi awal baru bagi perencanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang ditandai dengan ditetapkannya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam Perpres tersebut BPIW pada awalnya ditugaskan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan *refocusing* peran BPIW, maka melalui Perpres No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas BPIW disesuaikan menjadi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Penyesuaian tugas ini dibarengi dengan penguatan

struktur organisasi di tingkat Unit Eselon II dan III BPIW, yang dibagi berdasarkan pembagian kewilayahan.

Dengan membandingkan tugas BPIW saat ini dan pada periode kabinet sebelumnya, yang menarik perhatian adalah dengan semakin besarnya peran BPIW yang tidak hanya sebatas menyusun kebijakan teknis dan strategi, namun lebih jauh lagi untuk menyusun rencana dan mengawal keterpaduan program pembangunan infrastruktur PUPR dengan pendekatan pengembangan wilayah. Artikel yang Anda baca kali ini mencoba mengulas mengenai bagaimana BPIW diharapkan dapat mengawal keterpaduan program dengan segala kompleksitas yang membutuhkan fokus penanganan tersendiri.

Memahami Karakteristik Program dalam Kerangka Pendekatan Wilayah

Memahami karakteristik program dalam kerangka pendekatan wilayah merupakan bekal pemahaman mendasar yang perlu dimiliki seluruh personil teknis yang ditugaskan mengawal program pembangunan fisik infrastruktur di Kementerian PUPR, terutama di BPIW. Hal ini mengingat program memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian secara seksama agar tidak terjadi salah kelola program. Kesalahan pengelolaan program dapat berdampak pada terlambatnya penuntasan program atau bahkan dapat mengakibatkan mangkraknya program yang telah direncanakan.

Istilah "program" sendiri banyak digunakan di bidang-bidang selain pembangunan infrastruktur dan seringkali memiliki konotasi yang berbeda dengan pengertian program yang menjadi tugas BPIW. Pengertian program yang lebih cocok untuk pembangunan infrastruktur tercantum pada dokumen ISO 21503: 2017 Panduan Manajemen Program yaitu sebagai "struktur sementara dari komponen-komponen program (proyek-proyek, program, atau pekerjaan terkait lainnya) yang saling terhubung, yang dikelola secara terpadu untuk mendapatkan keuntungan yang berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis dan



Studio Peta

Sumber: BPIW 2021

operasional serta dalam mencapai manfaat-manfaat". Definisi serupa juga banyak dikutip dalam beragam literatur di bidang manajemen program.

Berbeda dengan proyek yang berujung dengan didapatkannya suatu produk, layanan, atau keluaran tertentu lainnya, program lebih berorientasi pada hasil (*outcome*). Misalnya program peningkatan akses transportasi menuju suatu kawasan wisata, dengan proyek-proyeknya yang dapat berupa pembangunan jalan baru atau pelebaran jalan dan pembangunan jalan. Begitu proyek-proyek tersebut selesai, membentuk kesatuan, dan berfungsi sesuai rencana, maka tujuan program peningkatan akses menuju kawasan wisata tersebut dapat dikatakan telah tercapai.

Tantangan dalam pengelolaan program terletak pada pengintegrasian program, terutama dari sisi kelembagaan, aspek teknis, anggaran, dan spasial. Dari sisi kelembagaan dan teknis tentunya sudah cukup jelas bahwa program yang melibatkan lebih dari satu unit kerja atau institusi dengan beragam aspek teknis memerlukan koordinasi dan sinkronisasi. Tantangan akan semakin besar ketika pengambilan keputusan berada di pihak eksternal, misalnya terkait perubahan anggaran yang tidak sepenuhnya menjadi wewenang pengelola program. Untuk pembangunan fisik infrastruktur, aspek spasial juga dapat menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam mengatasi keterbatasan ruang lahan yang tersedia.

Penerapan pembangunan infrastruktur PUPR yang didasarkan pada pendekatan wilayah juga menghadirkan tantangan tersendiri, selain optimisme bahwa program yang disiapkan akan menjadi lebih

terpadu. Untuk menerapkan pendekatan wilayah tersebut maka pengaplikasian analisis internal wilayah dan keterhubungannya dengan wilayah lain harus diterapkan dengan lebih kuat. Hasil analisis kewilayah tersebut menjadi dasar (*rationale*) dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Tujuannya tidak lain adalah agar praktik pembangunan infrastruktur PUPR tidak lagi bersifat sektoral, namun lebih kepada keterpaduan yang berorientasi pada hasil dan manfaat program.

Penerjemahan Tugas dan Fungsi BPIW

Pada acara virtual pelepasan generasi muda BPIW yang akan melakukan kunjungan lapangan pertengahan Oktober 2021 yang lalu, Bapak Menteri PUPR berkenan menjabarkan tugas BPIW dengan lebih gamblang. Secara umum, sebagai unit organisasi lain di Kementerian PUPR, BPIW diharapkan menjadi unit organisasi yang kuat, berwibawa, dan bermanfaat, yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Bapak Menteri PUPR memiliki harapan besar agar BPIW dapat menjadi pemandu bagi Direktorat Jenderal yang bertugas melakukan pembangunan fisik infrastruktur PUPR di seluruh wilayah tanah air. Untuk itu fungsi BPIW tidak dibatasi hanya sebatas pada penyusunan strategi atau dalam lingkup perencanaan, namun BPIW juga memiliki tugas mengawal program pada tahap penganggaran dan lebih lanjut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang telah digariskan.

Artinya, BPIW harus mampu menjadi "peramu" program dan menjadi *integrator* komponen-komponen program (proyek-proyek, program lain yang terkait,



Pembangunan Infrastruktur PUPR Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah

Sumber: BPIW 2021

dan pekerjaan terkait lainnya) di internal Kementerian PUPR, dan mengharmonisakannya dengan pihak eksternal kementerian. Dengan demikian pembangunan infrastruktur PUPR dapat dilaksanakan secara terpadu untuk memberikan manfaat sebenarnya dalam menyelesaikan masalah yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh yang dikemukakan Bapak Menteri PUPR adalah terkait penanganan kawasan kumuh. Beliau menyampaikan bahwa penanganan kawasan kumuh bukan hanya mempercantik tampilan kawasan, tapi lebih dari sekadar penanganan kawasan kumuh, yaitu agar penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh program di Kementerian PUPR yang dimungkinkan untuk ikut menangani, antara lain penyediaan air minum, pengelolaan sanitasinya, bahkan termasuk bantuan penanganan rumah-rumahnya. Di sini lah peran BPIW benar-benar diharapkan sebagai integrator program.

Untuk menterpadukan program tersebut tentunya BPIW harus memiliki dasar pertimbangan (*rationale*) dari hasil analisis yang dilakukan secara matang. Dasar pertimbangan tersebut juga penting bagi Direktorat Jenderal yang mengalokasikan anggarannya untuk menjadi bagian dari program besar yang telah dirancang dan telah diharmonisasikan dengan sektor-sektor lainnya. Dengan demikian maka tidak ada

lagi pelaksanaan pekerjaan yang berjalan sendiri-sendiri yang hanya didasarkan pada rencana program sektoralnya masing-masing.

Perlunya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Organisasi

Dalam mengemban tugas dan mewujudkan kesuksesan sebagai *integrator* program, maka BPIW perlu melakukan peningkatan kompetensi personil dan kapasitas organisasi secara berkesinambungan. Struktur organisasi yang ada saat ini, yang berbasis pada wilayah, dapat menjadi dasar yang baik untuk lebih fokus dan lebih mendalami karakteristik dan permasalahan di wilayah binaannya masing-masing.

Pemahaman yang baik atas wilayah binaannya masing-masing merupakan prasyarat utama dalam merencanakan program yang berkualitas dan berhasil lebih efektif dan efisien. Terlebih lagi dengan karakteristik kompleksitas program yang berbeda-beda di masing-masing wilayah, maka pemahaman yang diperlukan tidak hanya pada tataran strategis namun sering pula dibutuhkan pemahaman di banyak aspek teknis yang lebih detail.

Pemahaman terhadap wilayah masing-masing perlu dilengkapi dengan pemahaman konsepsi perencanaan dan manajemen program, serta



Sektor Infrastruktur PUPR
 Sumber: BPIW 2021

konsepsi-konsepsi pengembangan wilayah/kawasan yang lebih tematik seperti pengembangan kawasan wisata, kawasan industri, dan sebagainya. Berbagai konsep pembangunan wilayah tersebut perlu dikuasai sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan program yang tepat. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, jika diperlukan, BPIW dapat menjalin kerja sama dengan para ahli, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi yang dapat memberikan perspektif lain yang akan melengkapi hasil analisis di internal BPIW. Dengan demikian akan didapatkan dasar pertimbangan (*rationale*) program yang lebih kuat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tugas BPIW tidak berhenti pada perencanaan atau sampai ditetapkannya suatu program masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), namun tentunya perlu terus dilakukan pengawalan program dengan melakukan pemantauan dan evaluasi dengan benar. Pengawalan program harus terus dilakukan sampai program yang telah ditetapkan benar-benar tuntas dan bermanfaat sesuai dengan rencana. Pemantauan dan evaluasi yang benar akan dapat memberikan masukan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas program kedepan.

Dengan begitu banyaknya program dan proyek yang menjadi tugas Kementerian PUPR yang perlu dipersiapkan, dipantau, dan dievaluasi dengan baik, maka penggunaan Teknologi Informasi (TI) tidak

dapat dihindari. Teknologi Informasi dapat digunakan mulai dari tahapan awal kajian kewilayahan maupun sektoral, melakukan analisis dengan lebih mendalam, membantu dalam forum pembahasan pekerjaan yang lebih mendetail, sampai untuk keperluan monitoring dan evaluasi program. Penggunaan TI yang tepat akan dapat meringankan tugas-tugas personil BPIW dan secara langsung meningkatkan kapasitas kinerja unit organisasi.

Selain pengembangan kompetensi personil dan kapasitas organisasi sebagaimana diuraikan di atas, kemampuan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam berkomunikasi, baik dengan pihak di internal Kementerian PUPR maupun dengan pihak eksternal, baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan komunikasi yang baik akan menjadi bekal dalam menjalin kerja sama, berkoordinasi, bernegosiasi, dan untuk meyakinkan pihak lain atas gagasan yang kita miliki. Selain mempelajari komunikasi secara teori, kemampuan komunikasi akan semakin terasah dengan semakin banyaknya kesempatan berkomunikasi langsung dengan pihak lain. Dengan kemampuan komunikasi yang baik maka peran sebagai *integrator* program akan dapat diemban dengan lebih baik. (**)



oleh:

Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.

Kepala Bidang Keterpaduan Program
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
BPIW Kementerian PUPR

Ultimate goals atau tujuan akhir dari pembangunan infrastruktur PUPR adalah peningkatan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Infrastruktur menjadi faktor fundamental yang dapat mendorong faktor-faktor pertumbuhan lainnya. Untuk dapat membangun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, tepat sasaran, dan berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan tersebut, diperlukan perencanaan dan pemrograman yang berkualitas dan secara komprehensif dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Permen PUPR No. 13 Tahun 2020, BPIW diharapkan dapat menjadi 'penjahit' di antara 'benang merah' dan 'benang-benang yang masih perlu di uraikan' dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur PUPR. Sehingga diperlukan sudut pandang yang lebih besar dibandingkan unit organisasi lainnya, yaitu melalui pendekatan pengembangan wilayah.

Pendekatan pengembangan wilayah awalnya dilakukan dengan melihat secara komprehensif profil eksisting dan kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut. Selanjutnya secara lebih mendalam mulai dapat dipetakan kawasan-kawasan dan infrastruktur yang

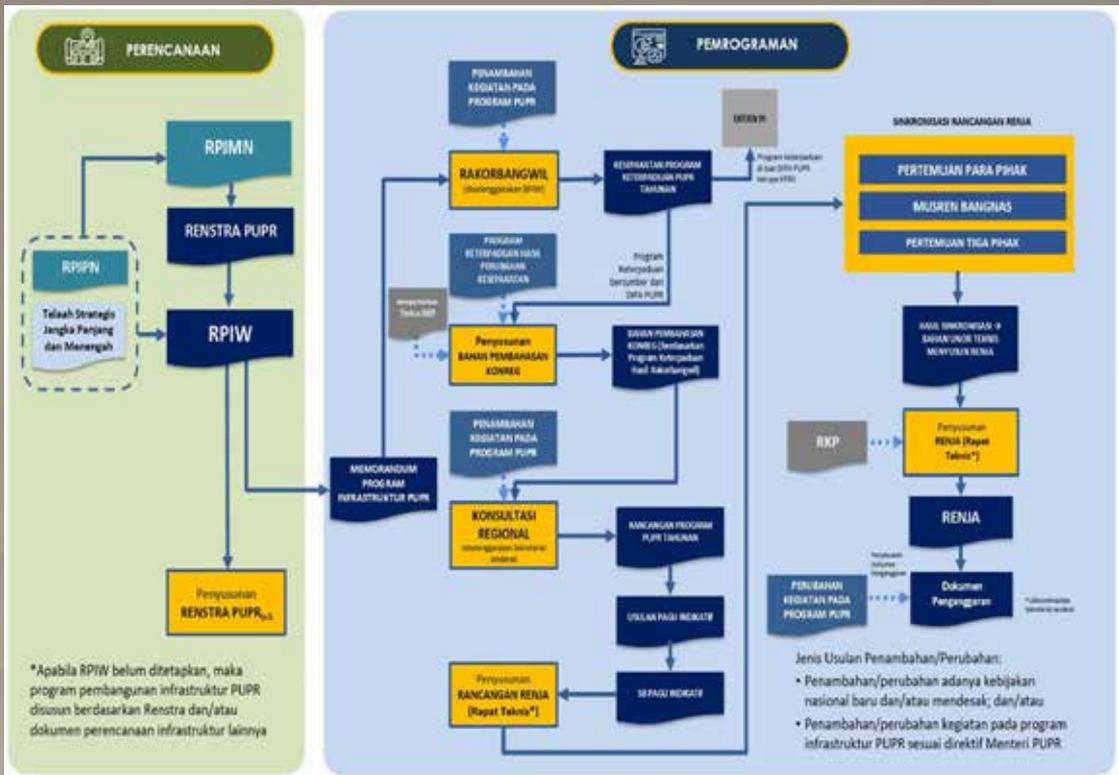
Sudah Selayaknya BPIW Menjadi Integrator Perencanaan dan Program Infrastruktur PUPR

perlu dibangun. Dengan menerapkan pendekatan pengembangan wilayah mulai dari perencanaan, pemrograman, sampai dengan pembangunannya, diharapkan infrastruktur PUPR yang mendukung sekaligus didukung program pembangunan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dapat mengakselerasi pertumbuhan, dan menghindari adanya infrastruktur yang tidak tepat bangun.

BPIW memang sudah selayaknya menjadi integrator perencanaan dan program di Kementerian PUPR. Lebih dari itu, BPIW juga seharusnya berperan sebagai integrator perencanaan antara Kementerian PUPR dengan K/L, Pemerintah Daerah, maupun stakeholders pengembangan wilayah lainnya. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang disusun BPIW dapat betul-betul lengkap menjawab permasalahan yang ada.

Untuk menjawab isu tersebut, saat ini BPIW sedang menyusun dokumen telaah strategis yakni Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP) Nasional yang secara makro akan memberikan arahan kebijakan dan strategi serta tahapan pengembangan infrastruktur berdasarkan isu strategis global, tantangan pembangunan, dan Visi Indonesia 2045. Selanjutnya, arahan makro dalam RPIJPN diturunkan dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan Renstra PUPR. Seluruh penyusunan dokumen ini tentunya melibatkan peran aktif dari seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya, BPIW juga telah dan akan kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR. Rakorbangwil merupakan forum koordinasi lintas sektor dan lintas K/L yang menghasilkan kesepakatan kawasan



Gambar 1 Sistem Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR

Sumber: BPIW 2021

dan program prioritas. Rakorbangwil menjadi hulu pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang hasilnya menjadi acuan substansi pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg).

Dengan sistem perencanaan dan pemrograman yang komprehensif ini, diharapkan seluruh kegiatan yang masuk sampai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR dapat terpadu, sehingga efektif berdampak dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan semangat awalnya untuk menjahit kebijakan lintas sektor dan K/L, BPIW dalam Rakorbangwil perlu dan sangat penting melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens lintas sektor dan K/L. Koordinasi tersebut terkait beberapa hal, yakni :

1. Koordinasi internal di BPIW untuk mendapatkan data-data lapangan serta hasil kajian dari kawasan baik yang yang diamanatkan RPJMN maupun kawasan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan ke depannya

2. Koordinasi dengan Bappenas untuk mendapatkan masukan kawasan mana saja yang akan dikembangkan tahun-tahun ke depannya.

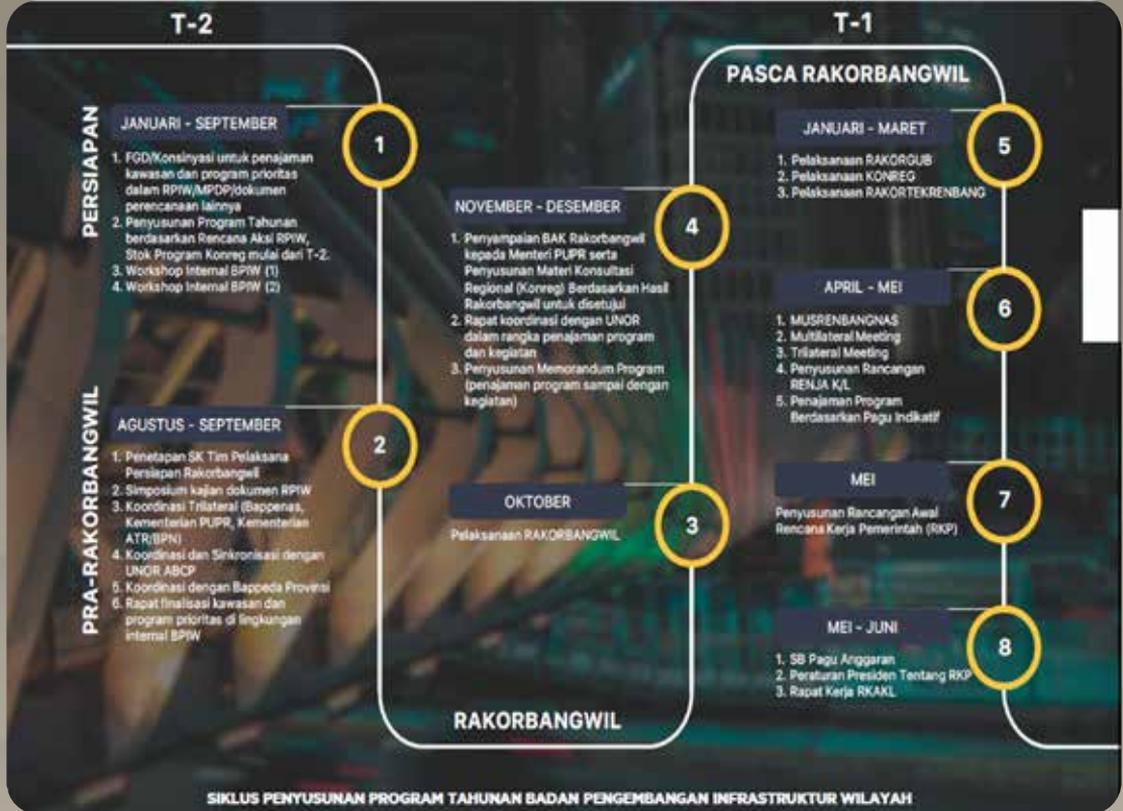
3. Melakukan koordinasi dengan unor Kementerian PUPR untuk menentukan program prioritas yang mendukung kawasan prioritas yang telah ditetapkan bersama Bappenas.

4. Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan RTRWN perihal kawasan yang akan dikembangkan

Hasil kawasan dan program yang telah disepakati dengan Bappenas dan unor PUPR, akan diintegrasikan dengan kegiatan K/L terkait di kawasan prioritas.

Selaras dengan penjelasan sebelumnya, tugas BPIW yang menjadi kolaborator antara Kementerian PUPR dengan stakeholders internal dan eksternal, diharapkan dapat menghasilkan program pembangunan infrastruktur yang terpadu. BPIW dapat memberikan justifikasi hingga merekomendasikan unit organisasi teknis untuk membangun infrastruktur di suatu kawasan berdasarkan hasil kajian dan koordinasinya dengan K/L lain.

Sebaliknya BPIW juga dapat mengajak K/L lain untuk turut aktif dalam mengakselerasi pengembangan wilayah. Misalnya, dalam Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor, BPIW memberikan kajian teknokratis



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Pra dan Pasca Rakorbangwil

Sumber: BPIW 2021

kepada unit organisasi teknis terkait kebutuhan perumahan ASN yang akan pindah ke Tanjung Selor, konektivitas di dalam Kawasan Inti Pemerintahan maupun Pusat Pertumbuhan lainnya, serta akses air baku, air minum, dan sanitasi di kawasan tersebut.

Infrastruktur PUPR tidak bisa berjalan sendiri, kontribusi Pemerintah Daerah dan K/L lain dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan, sehingga infrastruktur yang dibangun terutilisasi dengan optimal.

Bila bicara soal tantangan, menurut kami ada tiga hal yang menjadi tantangan terbesar dalam melakukan perencanaan dan pemrograman yang *impelementable* dan tepat sasaran kedepannya yakni ketidakpastian, pembangunan berkelanjutan, dan penerapan teknologi.

Ketidakpastian yang dimaksud ialah faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita hindari yang dapat menghambat pembangunan baik dalam skala besar maupun kecil. Misalnya saja krisis tahun 1998, dan 2008, pandemi Covid-19, maupun bencana alam.

Kondisi-kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang tentu juga akan berdampak pada terkontraksinya perekonomian.

Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagaimana proses perencanaan dan pemrograman dapat adaptif dan dinamis terhadap faktor ketidakpastian ini ke depannya. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan yang juga berkaitan penerapan teknologi.

Ke depannya, BPIW harus dapat mengadaptasi konsep-konsep pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan pengembangan wilayahnya. Tidak hanya menjawab kebutuhan infrastruktur secara dasar, tapi bagaimana Kementerian PUPR dapat mewujudkan pembangunan dengan konsep smart, livable, green, and sustainable.

Penerapan teknologi ke depannya juga perlu dimaksimalkan dalam proses perencanaan dan pemrograman. Teknologi canggih disertai database infrastruktur yang kuat, nantinya dapat mempermudah BPIW mengambil keputusan dan melakukan prioritisasi infrastruktur mana yang perlu dibangun.

Dari semua itu, yang menjadi dasar adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) insan BPIW menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi BPIW, yakni mewujudkan BPIW sebagai 'otak' dari pembangunan infrastruktur PUPR.



BPIW Miliki Peran Penting dalam Pengembangan Infrastruktur di Tanah Air

oleh:

Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A,
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I (Puswil I),
BPIW Kementerian PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peranan penting dalam pengembangan infrastruktur di Tanah Air. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR hulunya dari perencanaan yang dilakukan BPIW.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR, tercantum bahwa fungsi BPIW adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Tugas BPIW kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR yang memuat mengenai tugas dan fungsi BPIW serta struktur organisasi BPIW.

Peraturan Menteri itu juga menyebutkan mengenai 6 fungsi dari BPIW. Keenam fungsi BPIW tersebut yakni pertama, melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR. Fungsi kedua adalah penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR.

Kemudian fungsi BPIW yang ketiga yakni pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Selanjutnya fungsi keempat dari BPIW adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Fungsi yang kelima yakni pelaksanaan administrasi BPIW. Fungsi yang terakhir atau fungsi keenam adalah pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Menteri PUPR.

Artinya BPIW memiliki fungsi yang banyak dan strategis. Untuk keterpaduan BPIW memiliki peran memastikan terwujudnya keterpaduan infrastruktur PUPR. Mulai Keterpaduan antar sektor di Kementerian PUPR, seperti pengelolaan air yang ditangani sektor Sumber Daya Air, konektivitas ditangani sektor Bina Marga, permukiman yang ditangani sektor Cipta Karya dan perumahan yang ditangani sektor Penyediaan Perumahan.

Termasuk juga keterpaduan dalam penganggaran, yakni kombinasi APBN dan APBD provinsi, APBN Kab/kota dan lainnya, dalam rangka pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien.



Pimpinan dan Generasi Muda BPIW saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten.

Sumber: Kompu BPIW

Diamanahi Tugas Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Saat ini BPIW memiliki tugas mengatasi kemiskinan ekstrem yang diperintahkan oleh Menteri PUPR. Tugas tersebut untuk melakukan integrasi program di lingkungan Kementerian PUPR dan memfasilitasi kolaborasi program dengan kementerian/lembaga (K/L) lain dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem di Tanah Air.

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Adapun kriteria miskin ekstrem antara lain penghasilan USD 1,9 dollar Amerika/hari, termasuk dalam 360 kab/kota fokus penanganan *stunting* oleh Bappenas, *prevalensi stunting* tinggi, persentase sanitasi layak rendah, persentase air minum layak rendah, dan ada/tidaknya target penanganan kawasan kumuh 2020-2024.

Penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap, yakni 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021, 212 kabupaten/kota wilayah prioritas perluasan pada 2022, hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten/kota secara nasional (2023-2024).

Salah satu arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong

kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kebijakan ini dapat diupayakan Kementerian PUPR melalui penanganan secara kolaborasi program Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Perumahan.

Kolaborasi program baik antar Ditjen di lingkungan Kementerian PUPR ataupun dengan kementerian/lembaga lain dilakukan guna membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem dan *stunting* di Tanah Air.

Generasi Muda BPIW

Di belahan bumi mana pun, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas suatu bangsa tidak akan terlepas dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Hal itu merupakan tugas bersama seluruh lapisan elemen bangsa dalam rangka menciptakan kader bangsa kuat. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam pelaksanaan membangun bangsa dan negara.

Dalam internal BPIW, jajaran senior BPIW selalu berupaya melakukan kaderisasi terhadap generasi



Bersama Kepala BPIW, Rachman Arief saat melakukan survey lapangan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka penanganan miskin ekstrem.

Sumber: Kompu BPIW

muda BPIW, agar pada saatnya nanti siap mengemban tanggung jawab sebagai perencana tangguh dan berkualitas.

Kemudian untuk bersama-sama membawa posisi BPIW menjadi organisasi tangguh dan berwibawa, seluruh jajaran senior selalu memotivasi dan mengajak generasi muda untuk bersama-sama dapat mempersembahkan *planning* dan *programing* berkualitas kepada seluruh unit organisasi Kementerian PUPR, terutama sektor teknis seperti Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan.

Salah satu upaya BPIW memiliki produk *planning* dan *programing* yang berkualitas, jajaran BPIW saat ini mau tidak mau harus bekerja dalam peta. Artinya, setiap produk *planning* tidak lepas dari peta, agar *planning* yang ditawarkan memiliki justifikasi yang kuat

dan akan mempermudah implementasi. Tepatnya, implementasi sebagai bentuk tindak lanjut dari Ditjen teknik di lingkungan Kementerian PUPR.

Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke tahun kedepannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Saya yakin generasi muda BPIW mengikuti dan menggunakan teknologi tersebut. Diharapkan dengan kemajuan teknologi yang ada, para generasi muda BPIW bisa memanfaatkan teknologi yang canggih itu untuk menghasilkan *planning* dan *programing* yang makin berkualitas. (**)



Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra saat menyampaikan arahan dan harapan dalam kegiatan persiapan Rakorbangwil di Jakarta.

Sumber: Kompu BPIW

Persiapan Rakorbangwil Kementerian PUPR, BPIW Mematangkan Materi

Kegiatan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR akan dilaksanakan BPIW. Guna mendapatkan hasil optimal dalam kegiatan tersebut, BPIW melakukan berbagai persiapan. Salah satunya mematangkan prioritas kawasan dan program Tahun Anggaran (TA) 2023. Berikut ulasannya.

BPIW Kementerian PUPR menggelar rapat persiapan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR. Persiapan Rakorbangwil dilaksanakan dalam rangka mematangkan prioritas kawasan dan program TA 2023 yang dilakukan selama dua hari, Selasa-Rabu, 26-27 Oktober 2021.

Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan, penentuan prioritas ini harus benar-benar dicari yang paling utama. Oleh karenanya, dalam menetapkan prioritas perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti perbedaan lingkup fungsi BPIW dan unor, urgensi dan importansi yang relevan dengan kebijakan dalam jangka pendek, serta obyektif menggunakan proses analisis yang transparan.

"Penentuan prioritas ini harus benar-benar dicari yang paling utama,"

Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra

"Pertimbangan lainnya adalah terukur memperhatikan ketersediaan data, waktu, dan biaya," terangnya. Rachman meminta agar hal yang sedang disiapkan BPIW jelang Rakorbangwil seiring dengan isi dari Rancangan Peraturan Menteri PUPR (Rapermen) tentang Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kita juga semestinya mengetahui berapa banyak peraturan-peraturan yang ada yang termasuk direktif. Namun yang paling penting adalah kita fokus pada yang sudah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapuswilnas) BPIW, Benny Hermawan menyampaikan, agenda pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan Rakorbangwil terdapat 6 hal. Pertama, melakukan prioritas kawasan dan program TA 2023.

"Hal ini untuk melakukan tindak lanjut penentuan program dan kawasan yang akan dibahas dalam Rakorbangwil, serta untuk direncanakan pengembangannya oleh BPIW pada 2023," terangnya.

Kedua, ujar Benny, melakukan penyusunan dan penajaman matriks. "Substansi bahan harus dilakukan matrikulasi. Iya bekerja secara matriks," terangnya.

Untuk yang Ketiga, lanjut Benny, adalah melakukan penentuan outcome dari masing-masing program dan kawasan prioritas tahun 2023. "Keempat, hal yang tidak kalah penting adalah menyepakati struktur dan isian bahan paparan dari masing-masing pusat pengembangan wilayah," ujarnya.

Selain itu, Kelima adalah melakukan inputing data program dan kawasan prioritas. "Terakhir, keenam agendanya adalah melakukan persiapan bahan untuk rakor dengan Bappenas," tegas Benny.

Ia menambahkan bahan paparan rapat koordinasi dengan Bappenas

akan membahas kawasan prioritas dan reasoning kebutuhan dari perspektif pengembangan wilayah dan sektor. "Rakor dengan Bappenas ini akan dilakukan pada 4 November 2021 mendatang," terangnya.

Rapat persiapan Rakorbangwil ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II (Kapuswil II), BPIW Kuswardono, serta jajaran staf di lingkungan BPIW.

Seperti diinformasikan sebelumnya, kegiatan Rakorbangwil Bidang PUPR akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2021 digelar guna mendapatkan hasil kesepakatan mengenai program-program usulan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2023. **(Ris)**



Rapat persiapan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang digelar BPIW, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sumber: Kompu BPIW

"Kawasan prioritas dan reasoning kebutuhan dari perspektif pengembangan wilayah dan sektor,"
**Kapuswilnas BPIW,
Benny Hermawan**



Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur

Sumber: unsplash.com

Menyambut ITMP Labuan Bajo: Dukungan Infrastruktur PUPR dan Tantangan ke Depan



oleh:

Melda Magiafitri

Perencana Ahli Pertama Kementerian PUPR

Sesuai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang menyatakan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor strategis untuk memperkuat dan memajukan perekonomian nasional. Melalui Integrated Tourism Development Project, Kementerian PUPR, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai *executing agency* berkomitmen dalam mengimplementasi komponen-komponen program baik dari sisi dokumen rencana, pembangunan fisik infrastruktur, pengembangan destinasi wisata, hingga rencana investasi. BPIW dengan Kementerian/Lembaga terkait

lainnya dalam hal ini memikul tanggung jawab untuk mengawal penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) untuk destinasi-destinasi pariwisata prioritas dalam RPJMN yang salah satunya termasuk Labuan Bajo, wilayah kecil di ujung Barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. ITMP Labuan Bajo yang saat ini dalam proses penyusunan, berperan sebagai dokumen acuan untuk rencana pengembangan pariwisata yang meliputi kajian *baseline*, proyeksi pertumbuhan wisata, skenario pengembangan dan juga rencana aksi program untuk Kawasan Wisata Utama (*Key Tourism Area*) yang sebelumnya ditentukan dalam dokumen *market and demand assessment*.

Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Keindahan pantai, keunikan geomorfologi Kepulauan Flores dan keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage yang menarik wisatawan membuat Labuan Bajo menjadi salah satu DPP yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Terlebih lagi, Labuan Bajo juga ditunjuk sebagai salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang membuat Labuan Bajo menjadi fokus dari pembangunan pariwisata dari banyak Kementerian/ Lembaga. Dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai DPSP dengan tagar “Labuan Bajo Sebagai Destinasi Pariwisata Super Premium Berkelanjutan Kelas Dunia”, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkerjasama dalam mengembangkan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dari destinasi wisata Labuan Bajo dan sekitarnya yang berstandar internasional.

Atensi wisatawan terhadap destinasi wisata Labuan Bajo meningkat cukup tinggi di lima tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah wisatawan yang mencapai lebih dari dua kali lipat dengan proporsi wisatawan terbesar adalah wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara bertambah dari 83 ribu pengunjung per tahun menjadi 182 ribu per tahun (BPOLBF, 2021). Sehingga, rata-rata persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan melebihi angka 30% di setiap tahunnya, jauh mengungguli Bali yang pada tahun 2016-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7% (BPS, 2021).

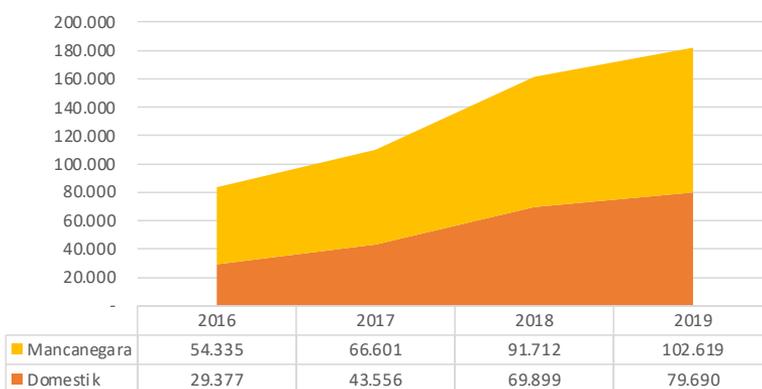
Sektor pariwisata merupakan sektor yang disorot dalam RPJMN 2020-2024. Sektor ini ditargetkan untuk dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), menyelesaikan pembangunan DPSP, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pariwisata, dan diharapkan dapat meningkatkan nilai devisa sektor pariwisata. Dalam masa lima tahun RPJMN ini, peningkatan added value pada sektor pariwisata diutamakan untuk peningkatan average length of stay atau rata-rata lama tinggal dari wisatawan dan pengeluaran wisatawan sebagai output dari perbaikan dan peningkatan kualitas atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dari Destinasi Pariwisata Prioritas.

Isu Wilayah dan Dukungan Kementerian PUPR

Pada tahun anggaran 2020, Kementerian PUPR telah mengeluarkan dana sebesar 635,8 milyar dan pada tahun anggaran 2021 dengan total anggaran 625,08 milyar untuk pembangunan infrastruktur dalam hal penataan lingkungan, pengembangan kawasan permukiman layak huni, peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan air baku, serta pembangunan sarhunta sebagai homestay, kios dan rumah makan yang ditujukan untuk penyediaan infrastruktur dasar, amenitas, aksesibilitas dan merespon isu strategis kepulauan.

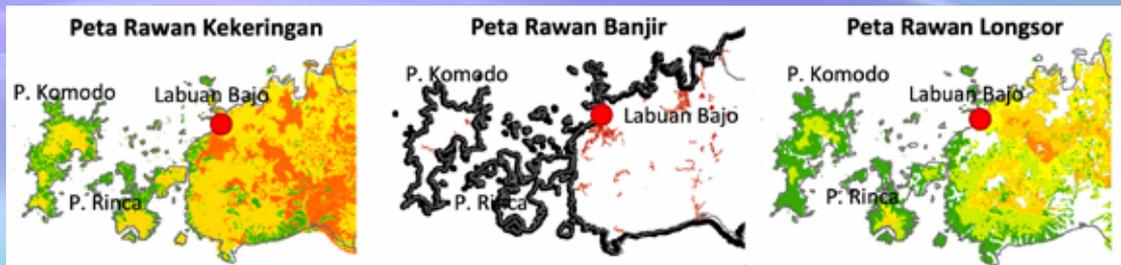
Untuk sektor sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun penyediaan air tanah dan air baku untuk Labuan Bajo, sarana dan prasaran pengaman pantai di Loh Buaya, Pulau Rinca, dan sarana dan prasarana pengendali banjir Sungai Waemese. Permasalahan utama terkait sumber daya air di Labuan Bajo adalah kekeringan. Sehingga akses air baku untuk air minum, pertanian dan peternakan sangat minim sehingga berdampak kurang optimalnya produksi komoditas. Kekeringan tidak hanya dirasakan di daerah kawasan Labuan Bajo saja. Peta Rawan Kekeringan menggambarkan sebagian

Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Labuan Bajo 2016-2019



besar Kab. Manggarai Barat yang menunjukkan indeks risiko sedang-tinggi. Selain itu, kawasan sekitar Labuan Bajo juga rentan terhadap banjir. Hal tersebut dikarenakan debit air Sungai Waemese yang meluap ketika terjadi hujan, dan daerah aliran sungai (DAS) Waemese merupakan DAS terbesar di Kota Labuan Bajo (total 51,25 km² di dalam dan di luar Kota Labuan Bajo). Sehingga sarana dan prasarana pengendali banjir diperlukan untuk menangani isu banjir ini. Isu terkait infrastruktur SDA selanjutnya adalah risiko longsor terutama di destinasi wisata Loh Buaya, Pulau Rinca, pulau dengan jumlah populasi binatang Komodo terbanyak. Struktur tanah di Loh Buaya rentan terhadap longsor utamanya saat hujan yang dapat menjauhkan lereng sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan pengunjung dan juga Komodo.

Peta Rawan Kekeringan, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor Kab. Manggarai Barat (2021)



Sumber: : INARISK BNPB, 2021

Salah satu proyek strategis nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan jalan akses KSPN Labuan Bajo. Peningkatan kualitas jalan diperlukan untuk optimalisasi pergerakan ekonomi di dalam, dari dan menuju Kota Labuan Bajo. Peningkatan kualitas dapat mengefisieni pergerakan logistik yang diprediksi akan meningkat dengan adanya pengembangan pariwisata dan pembangunan Terminal Multi-Purpose Wae Kelambu di bagian utara Kota Labuan Bajo. Kondisi jalan Kota Labuan Bajo – Pelabuhan sebelumnya masih kerikil dan tanah sehingga di TA 2021 sudah dimulai kegiatan pengaspalan jalan dari kota menuju pelabuhan.

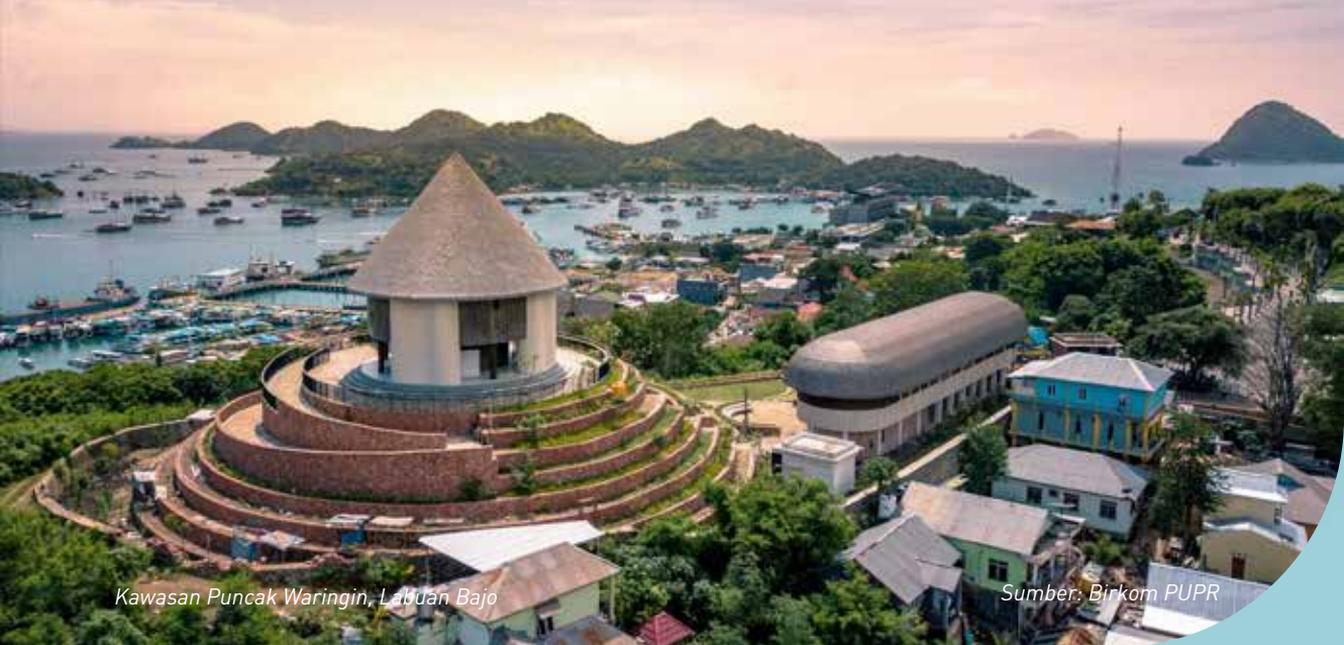


Peta Peningkatan Aksesibilitas KSPN Labuan Bajo
Sumber: : Hasil Olahan, 2021

Proyek strategis terkait aksesibilitas berikutnya adalah pembukaan jalur baru dari Labuan Bajo – Terang – Bari untuk membuka akses pantai utara Pulau Flores untuk menghubungkan pusat kegiatan lainnya dan mengoptimalkan fungsi pusat kegiatan wilayah Labuan Bajo. Sebelum jalan nasional Labuan Bajo – Ruteng terbangun, masyarakat di Barat Pulau Flores bertumpu pada akses laut untuk mobilisasi. Kota

Labuan Bajo memasok ikan ke Kota Ruteng dengan menempuh perjalanan laut dari Labuan Bajo ke pelabuhan Reok di sebelah Utara Kota Ruteng. Dengan membuka jalan baru, maka diharapkan aktivitas pelabuhan Reok dan pelabuhan lain sepanjang Pantai Utara Pulau Flores dapat meningkat.

Selain aksesibilitas dari dan menuju Labuan Bajo, di TA 2020-2021 terdapat kegiatan peningkatan jalan, penataan trotoar dan penataan drainase di jalan dalam Kota Labuan Bajo. Trotoar diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan pedestrian, dan drainase ditata untuk mendukung sebagai pengendali banjir dalam kota. Kegiatan ini mempercantik tata desain dalam Kota Labuan Bajo menjadi kota yang lebih nyaman baik terhadap masyarakat lokal juga wisatawan yang didukung juga oleh program penataan kawasan di Direktorat Jenderal Cipta Karya.



Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo

Sumber: Birkom PUPR

Penataan kawasan di dalam Kota Labuan Bajo gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memberikan wajah baru Labuan Bajo sesuai dengan tagar wisata premium. Penataan kawasan ini berpegang pada prinsip-prinsip desain yang menyatu dengan alam, menggunakan unsur budaya lokal, dan memiliki ruang terbuka publik. Sepanjang tahun anggaran 2020-2021, Ditjen CK sudah melakukan penataan kawasan untuk: Puncak Waringin, Goa Batu Cermin, Pantai Marina – Bukit Pramuka, dan Pulau Rinca. Penataan kawasan ini merespon kebutuhan masyarakat dan juga wisatawan saat ini dan mendatang. Puncak Waringin dibangun sebagai *creative hub*, pusat informasi, pusat kerajinan sebagai penggerak ekonomi lokal dan pusat kebudayaan di Labuan Bajo untuk melestarikan

budaya Manggarai Barat seperti tenun ikat, tari, dan seni budaya lainnya. Tidak jauh dari Puncak Waringin, saat ini juga sedang berjalan penataan kawasan Pantai Marina yang direncanakan akan berfungsi sebagai wajah baru Kampung Ujung, wisata kuliner Labuan Bajo.

Penataan Kawasan Pantai Marina (2021)

Selanjutnya adalah penataan destinasi wisata kawasan Pulau Rinca dan kawasan Batu Cermin. Penataan kawasan Pulau Rinca meliputi peningkatan dermaga eksisting Loh Buaya, bangunan pengaman pantai yang juga bergungsi sebagai jalur keluar-masuk destinasi wisata, elevated deck sebagai jalur pedestrian yang menghubungkan dermaga ke bangunan lainnya, bangunan pusat informasi untuk wisatawan yang terintegrasi dengan elevated deck yang berfungsi sebagai guest house, kafetaria dan kantor, dan bangunan penginapan untuk ranger, pemandu wisata, juga peneliti. Berikutnya penataan kawasan Batu Cermin yang menambahkan bangunan entrance, dan jalur masuk ke Goa Batu Cermin. Bangunan entrance sekarang berfungsi sebagai amenitas wisata yaitu pusat informasi, kios kerajinan lokal, kafetaria, juga toilet.



Penataan Kawasan Pantai Marina (2021)

Sumber: dok pribadi

Penataan Kawasan Wisata Batu Cermin

Tidak hanya penataan kawasan, Ditjen Cipta Karya juga membangun dan mengoptimalkan sarana dan



Penataan Kawasan Wisata Batu Cermin

Sumber: Hasil Observasi Drone BPIW, 2021

prasarana infrastruktur dasar air minum, persampahan, dan sanitasi. Capaian air minum perpipaan di Kab. Manggarai Barat hanya 16% dari rumah tangga. Di daerah perkotaan, lebih dari 70% sumber air minum rumah tangga adalah dari air minum dalam kemasan (BPS, 2020). Sementara, untuk daerah perdesaan hampir 60% bergantung pada mata air terlindungi (BPS, 2020). Saat ini, SPAM yang berfungsi adalah SPAM IKK Labuan Bajo, IKK Lembor, dan IKK Golobaru, dan di TA 2021 dianggarkan untuk pembangunan jaringan perpipaan baru SPAM Wae Mese II untuk meningkatkan akses air minum layak.

Kemudian, permasalahan sanitasi dan persampahan juga direspon dengan optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), optimalisasi IPAL Labuan Bajo, dan pembangunan toilet di sekitar KSPN Labuan Bajo. TPA di Kab. Manggarai Barat yang berfungsi saat ini adalah TPA Warloka. Bertujuan mengelola sampah dalam prinsip yang lebih ramah lingkungan, maka TPA Warloka dioptimalisasi menggunakan pengelolaan sampah teknologi termal. Teknologi termal dapat mengolah sampah lebih banyak dalam waktu yang singkat, dan panas dari pembakaran dapat dikonversikan menjadi energi. Optimalisasi IPAL berupa peningkatan kapasitas menjadi 170m³ per hari dilakukan di kawasan Pantai Marina, diharapkan

pengelolaan air limbah menjadi lebih maksimal untuk sanitasi Kota Labuan Bajo yang layak. Lalu, pembangunan toilet umum yang bersih dan nyaman juga dilakukan di sekitar destinasi wisata, salah satunya adalah Goa Rangko destinasi wisata di bagian Utara Kota Labuan Bajo.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas untuk Sarana Hunian Pendukung Pariwisata

Salah satu inovasi Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan adalah peruntukan BSPP yang dapat digunakan untuk sarana hunian pendukung pariwisata (sarhunta). Di tahun 2020, tersalurkan total 660 unit BSPP peningkatan kualitas untuk sarhunta yang tersebar di Kab. Manggarai Barat sebanyak 632 unit dan di Kab. Manggarai sebanyak 28 unit. Sebesar 40% dari sarhunta adalah unit homestay, 30% untuk perbaikan rumah di koridor utama, dan sisanya untuk perbaikan unit toko (15%), kuliner (7%), workshop (4%), dan jasa lainnya (3%).

Tantangan Pariwisata Labuan Bajo dan Flores

Dokumen ITMP Labuan Bajo yang sedang disusun memusatkan key tourism areas hanya di dalam lingkup Kab. Manggarai Barat. Namun, dengan tujuan besar meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata

Unit Homestay



Unit Kuliner



Unit Kios



Unit Rumah di Koridor Utama



Sumber: Direktorat SS Ditjen Penyediaan Perumahan, 2021

Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Kota Labuan Bajo dan Sekitarnya TA 2020-2021

Tahun Anggaran 2020 635,85 M			
Sumber Daya Air 44,65 M	Bina Marga 368,61 M	Cipta Karya 65,63 M	Perumahan 156,94 M
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan penyediaan air tanah untuk air baku Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai Loh Buaya, Pulau Rinca 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jalan pariwisata Waecicu Peningkatan jalan dan penataan trotoar dan drainase Jl. Soekarno Hatta Atas, Soekarno Hatta Bawah, Jl. Sp. Pede, Jl. Yohanes Sahadun Pembangunan jalan ruas Labuan Bajo – Terang – Bari Pelebaran jalan menuju standar ruas jalan Labuan Bajo – Malawatar 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan KSPN Kws Puncak Waringin Kab. Manggarai Barat Penataan KSPN pengembangan Kws Batu Cermin Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Optimalisasi jaringan SPAM Kws Labuan Bajo Pembangunan reservoir SPAM Pulau Rinca 	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Pengembangan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata
Tahun Anggaran 2021 625,08 M			
Sumber Daya Air 65,8 M	Bina Marga 53,12 M	Cipta Karya 506,11 M	Perumahan 0 M
<ul style="list-style-type: none"> Lanjutan pembangunan sarana prasarana pengaman pantai Loh Buaya, Pulau Rinca Pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir Sungai Waemesse, Labuan Bajo 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaspalan jalan Labuan Bajo – Terang – Pelabuhan Peningkatan jalan dan penataan trotoar dan drainase ruas Jl. Alo Tanis, Labuan Bajo Pembangunan jalan ruas Labuan Bajo – Terang – Bari Preservasi jalan Labuan Bajo – Malawatar – Kota Ruteng 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan KSPN Kawasan Pantai Marina – Bukit Pramuka (Zona 1, 2, 3, dan 5) Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Penataan KSPN fasilitas penunjang wisata Pulau Rinca Kab. Manggarai Barat Penataan lansekap segmen 1 dan 2 KSPN Labuan Bajo Optimalisasi IPAL Labuan Bajo Pembangunan pengelolaan sampah proses thermal Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Waemesse II Optimalisasi TPA Warloka Labuan Bajo Pembangunan toilet KSPN Labuan Bajo 	

melalui peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, maka memfokuskan pengembangan DPP hanya di Labuan Bajo saja tentu tidak cukup. Pulau Flores, dengan ragam destinasi wisata dalam rentang wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya yang kaya, perlu mendapat perhatian yang sama khususnya dari Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan pembangunan daerah.

Tidak hanya pembangunan fisik infrastruktur yang menjadi sasaran utama, tetapi jika target RPJMN 2020-2024 untuk sektor pariwisata adalah penyerapan tenaga kerja pariwisata yang masif, maka soft infrastructure berperan vital. Maka, tantangan berikutnya adalah mengembangkan aset Sumber Daya Manusia di DPSP Labuan Bajo. Pada data terakhir, IPM Kab. Manggarai Barat sebesar 63,5, di bawah Provinsi NTT yang sebesar 65,19 dan IPM Nasional 71,9 (BPS, 2019). Sementara untuk menawarkan wisata premium, keramahtamahan dan *hospitality* dari tenaga kerja pariwisata dan masyarakat lokal juga harus ditingkatkan.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyiapkan DPSP Labuan Bajo dan destinasi wisata lainnya di Pulau Flores sebagai destinasi wisata yang siap pasca Pandemi Covid-19. Adanya pandemi mengubah

tidak hanya standar kualitas protokol dari destinasi wisata, tetapi juga preferensi wisatawan. Studi terkait pergeseran tren wisata pasca pandemi menyimpulkan bahwa destinasi wisata alam menjadi pilihan tujuan utama wisatawan (Kusumaningrum & Wachyuni, 2020). Pernyataan ini juga didukung oleh data dari situs web wisata booking.com (2020) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan tajam preferensi wisatawan yang mencari destinasi wisata yang menawarkan udara yang sehat (50%), lingkungan alam (44%), dan lokasi yang dapat menawarkan relaksasi (33%) sepanjang tahun 2020. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pelaku usaha dapat merumuskan *travel pattern* baru yang sesuai dengan permintaan pasar agar sektor pariwisata di DPSP Labuan Bajo dan Pulau Flores dapat berkelanjutan.

Kemudian, BPIW sebagai integrator pembangunan infrastruktur PUPR dan pengawal penyusunan ITMP perlu memberikan penekanan khusus pada proyek-proyek yang mungkin tidak termasuk ke dalam proyek "major" tetapi menjadi fatal bila tidak dipenuhi, yaitu pemenuhan akses kebutuhan dasar rumah tangga.

Sumber:

BPOLBF. 2021. Masterplan Labuan Bajo.

BPS. 2020. Statistik Kesejahteraan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PUPR. 2021. Kajian RPIW Pulau Flores BPIW.

Kementerian PUPR. 2021. Buku Eksotika Labuan Bajo.

Linden, G. 2021. Understanding the nature-driven traveler. https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/understanding-nature-driven-traveller?utm_campaign=60ff990bfaodafo001581b71&utm_content=613b303b74057d0001a04f80&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin

Naumov N., Green D. 2016. Mass Tourism in (eds) Encyclopedia of Tourism. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01384-8_378

Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Rilis PUPR 2. 2020. Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Puncak Waringin sebagai Creative Hub KSPN Labuan Bajo.

Wachyuni, S. S., & Kusumaningrum, D. A. 2020. The Effect of COVID-19 Pandemic: How are the Future Tourist Behavior?. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 33(4), 67-76. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2020/v33i430219>

Jika kebutuhan dasar air minum, sanitasi, rumah layak huni tidak terpenuhi, maka pembangunan yang sudah besar-besaran tersebut tidak akan menjadi sustainable. Selain itu, BPIW juga perlu memperhatikan outcome dibandingkan dengan output dari proyek-proyek nasional di dalam DPSP. Tidak hanya indikator "sekian infrastruktur terbangun" tetapi perlu juga memperhatikan *economic and social return* dari terbangunnya infrastruktur tersebut.

Dengan pembangunan masif yang dilaksanakan di Kota Labuan Bajo sebagai pusat kegiatan baru, diharapkan pembangunan ini dapat menstimulus pembangunan di wilayah Kepulauan Flores lainnya sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sana.

Selamat Hari Raya Natal

Semoga Damai Natal menyertai Keluarga Besar PUPR
dan
Tahun Baru 2022





Press Tour ke Lombok Mandalika

Sumber: Kompu BPIW

Gelar Press Tour, BPIW Ajak Media Massa Melihat Secara Langsung Pembangunan Infrastruktur PUPR di Lombok

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehubungan dengan hal itu BPIW yang didampingi tim Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR mengajak media massa nasional melihat secara langsung pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah di provinsi tersebut melalui program *press tour*, yang dilaksanakan pada 3 hingga 5 November 2021.

BPIW yang didampingi tim Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR mengajak media massa nasional melihat secara langsung pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah

Kementerian PUPR dan diintegrasikan dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) lain seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian PPN/ Bappenas. "Rekomendasi dari ITMP diimplementasikan di lapangan untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional," ujar Rachman.

Kegiatan ini diikuti delapan media nasional yakni Media Indonesia, Rakyat Merdeka, CNBC, Liputan 6, Tribun News, Kompas. Com, Kumparan, dan Jawa Pos. Saat berbicara dengan awak media melalui *video conference* (vicon), Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan BPIW turut berperan mendukung perencanaan terpadu pengembangan pariwisata melalui penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) yang mendapat bantuan dari Bank Dunia.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW Kuswardono menambahkan, pada November 2017 lalu, pemerintah memutuskan mengembangkan 10 Bali Baru yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika - Lombok (NTB), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu-Kota Tua (DKI Jakarta). pada November 2017.

ITMP yang disusun BPIW tersebut dilakukan secara terpadu dengan unit organisasi (unor) di lingkungan

Dari 10 Bali Baru itu, ada empat yang dimasukkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya,



TPA Kebon Kongok Lombok Barat
Sumber: Kompu BPIW

Mandalika - Lombok dan Labuan Labo. Dari empat Destinasi Pariwisata Super Prioritas itu ditambah Manado-Likupang. Sehingga ada lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Lebih lanjut ia menyatakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok disiapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan internasional, seperti *World Superbike* (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022.

Kawasan Mandalika - Lombok merupakan salah satu dari lima DPSP yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Guna mendukung pengembangan pariwisata di kawasan tersebut, Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran sebesar Rp 403,99 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2020. Dengan anggaran tersebut sejumlah program telah dilakukan, seperti pada sektor Sumber Daya Air (SDA) pembangunan infrastruktur yang dibangun terkait Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kab. Lombok Tengah. Sedangkan pada sektor jalan dan jembatan diprogramkan Pembangunan Jalan *Bypass* Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika 1,2, dan 3.

Sedangkan pada sektor permukiman, dilaksanakan beberapa program seperti Pengembangan Kawasan

Kegiatan *Press Tour* ini meninjau beberapa pembangunan infrastruktur PUPR seperti Tempat Pembuangan Air (TPA) Kebon Kongok Lombok Barat yang dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) Ditjen Cipta Karya. Di TPA ini akan dibangun *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB).

Wisata di Tiga Gili, Peningkatan TPA Pengengat (Desa Pengengat, Kec Pujut, Kab. Lombok Tengah), dan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara. Kemudian, sektor perumahan memiliki beberapa program pembangunan infrastruktur seperti Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Pengembangan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata

Dukungan infrastruktur PUPR tersebut berlanjut pada TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp 912 miliar. Anggaran tersebut untuk membiayai program pada sektor SDA seperti Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah dan Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika.

Selain itu, ada dukungan infrastruktur PUPR sektor jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp 561,18 miliar untuk Pembangunan Jalan *Bypass* BIL - Mandalika. Sektor permukiman menelan dana sebesar Rp 151,6 miliar. Beberapa proyek yang direalisasikan seperti Pengembangan Kawasan Wisata Tiga Gili,

Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara, Peningkatan TPA Pengengat (Desa Pengengat, Kec Pujut, Kab. Lombok Tengah), dan Pembangunan SPAM Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Tahap I (IPA Kap. 50 L/detik dan Jaringan Perpipaan).

Kegiatan *Press Tour* ini meninjau beberapa pembangunan infrastruktur PUPR seperti Tempat Pembuangan Air (TPA) Kebon Kongok Lombok Barat yang dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) Ditjen Cipta Karya. Di TPA ini akan dibangun *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB).

Kepala BPPW NTB Ditjen Cipta Karya Ika Sri Rejeki menjelaskan, pengembangan RDF masih dalam proses pengerjaan dengan target selesai di 2022. Ika mengatakan, diperlukan perluasan dengan pembebasan lahan hingga 4,8 Ha dengan peruntukan 2 Ha sebagai *landfill* baru. "Kami harapkan di awal Januari - Februari 2022 sudah stabil untuk pekerjaan fisiknya. Jadi tahun depan itu diharapkan sudah bisa berjalan," ucap Ika.

Kunjungan dilanjutkan ke *Bypass BIL-Mandalika*. Saat peninjauan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB Reiza Setiawan mengatakan pembangunan jalan *Bypass BIL* sepanjang 17,36 km akan memperlancar konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata di DPSP Mandalika, sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan Mandalika. Keberadaan jalan *bypass* menurutnya akan mengurangi waktu tempuh dari bandara menuju kawasan Mandalika dari yang semula 45 menit menjadi 15 menit.

Tinjauan juga dilakukan ke Sarana Hunian Pariwisata Gerupuk Lombok Tengah yang ditangani Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTB Direktorat Jenderal Perumahan. Kasi Wilayah II BP2P NTB Dudi Mustofa menyatakan dari total 398 unit rumah, sebanyak 300 unit rumah berada di Kawasan Mandalika dan 98 unit di kawasan Gili Air.

Kunjungan dilanjutkan ke *Bypass BIL-Mandalika*. Pembangunan jalan *Bypass BIL* sepanjang 17,36 km akan memperlancar konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata di DPSP Mandalika, sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan Mandalika.



Sirkuit Mandalika
Sumber: Kompu BPIW



Tinjauan juga dilakukan ke Sarana Hunian Pariwisata Gerupuk Lombok Tengah yang ditangani Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTB Direktorat Jenderal Perumahan. Dari total 398 unit rumah, sebanyak 300 unit rumah berada di Kawasan Mandalika dan 98 unit di kawasan Gili Air.

Dudi menambahkan, satu rumah mendapat anggaran dengan pendanaan maksimal Rp 115 juta. Namun, tiap-tiap rumah mendapat angka yang berbeda sesuai tingkat kerusakan huniannya. "Jadi ada yang hanya butuh dibantu Rp 90 juta dan ada yang lebih, beda-beda, tapi maksimal Rp 115 juta. Bila ada warga mau menambah anggarannya secara swadaya, boleh saja," sambung Dudi.

Para wartawan juga melihat proyek Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Ditjen SDA. Saluran drainase utama di area sirkuit Mandalika dibangun sepanjang 7.221 meter. Tujuannya untuk mencegah Mandalika *International Street Circuit* terendam banjir.

Para wartawan juga melihat proyek Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Ditjen SDA. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Ditjen SDA Kementerian PUPR Sonny Iswanto menyebutkan, saluran drainase utama di area sirkuit Mandalika dibangun sepanjang 7.221 meter.

Tujuannya untuk mencegah Mandalika *International Street Circuit* terendam banjir. "Pembangunan drainase atau pengendali banjir di area sirkuit itu dibangun dengan dua tahun anggaran, yaitu 2020 dan 2021," kata Sonny.

Pejabat BPIW yang turut melakukan tinjauan lapangan tersebut antara lain Sekretaris Iwan Nurwanto, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Hari Suharto Diyaksa, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIC BPIW Bernadi Haryawan, dan tim dari Birkom Kementerian PUPR yang dipimpin Puji Yudiantoro. **(Hendra)**



Proyek saluran pengendali banjir KEK Mandalika
Sumber: Kompu BPIW



Sumber: ui.ac.id

Ekonomi Sirkular: Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Menuju Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

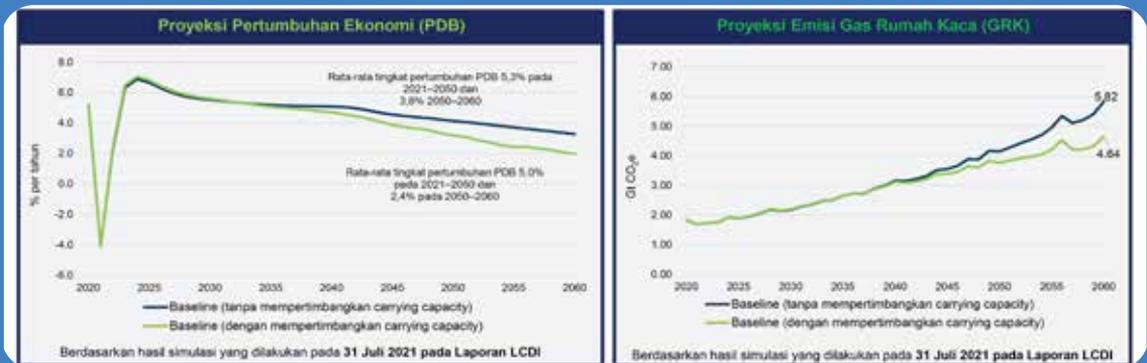


oleh:
Dea Mustika Mufarrihah, S.T.
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
Kementerian PUPR

Pertumbuhan Ekonomi vs Perubahan Iklim

Menuju kemerdekaan Indonesia ke-100 tahun pada tahun 2045, telah ditetapkan visi Indonesia 2045 yang ingin dicapai melalui pembangunan di berbagai sektor. Strategi pencapaian visi tersebut didukung dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024.

Pembangunan infrastruktur menuju 2045 diarahkan untuk merata dan terintegrasi di seluruh Indonesia, mulai dari peningkatan konektivitas fisik maupun virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, pemenuhan prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta adanya antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim.



Paparan Direktur Lingkungan Hidup Bappenas

Sumber: Bappenas 2021



Amager Bakke, insinerator yang mengubah sampah kota menjadi energi listrik. Instalasi pengolahan sampah ini berfungsi ganda sebagai sarana rekreasi di Kopenhagen, Denmark.

Sumber: nytimes.com

Berdasarkan laporan *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) pada Juli 2021, proyeksi pembangunan secara "business as usual" menunjukkan penurunan pada pertumbuhan PDB yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun ini tentunya akan mempersulit Indonesia untuk dapat mencapai Visi 2045 dan keluar dari Middle Income Trap. Tanpa intervensi, aktivitas pembangunan yang tinggi akan meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca sehingga akan mengakibatkan berbagai masalah sosial dan kesehatan.

Terkait pertumbuhan ekonomi vs perubahan iklim, maka timbul suatu kebutuhan untuk melakukan transformasi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan. Transformasi ekonomi yang dimaksud dilakukan untuk mengubah struktur perekonomian dari sektor dengan produktivitas rendah ke produktivitas tinggi serta meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor.

Manfaat Ekonomi Sirkular

Pada Desember 2015, untuk pertama kalinya Komisi Eropa (*the European Commission*) meluncurkan gerakan yang disebut sebagai ekonomi sirkular, sebuah gerakan yang terintegrasi mulai dari penyusunan rencana aksi hingga rancangan peraturan yang mengatur mengenai

Terkait pertumbuhan ekonomi vs perubahan iklim, maka timbul suatu kebutuhan untuk melakukan transformasi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan. Transformasi ekonomi yang dimaksud dilakukan untuk mengubah struktur perekonomian dari sektor dengan produktivitas rendah ke produktivitas tinggi serta meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor.

pembuangan limbah di Uni Eropa. Pada Maret 2020, mereka meluncurkan *new Circular Economy Action Plan* (CEAP) sebagai bagian dari *European Green Deal* untuk mensukseskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tanggal 24 Februari 2020 dengan dukungan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dan Pemerintah Denmark meluncurkan inisiatif baru untuk mendukung pengembangan strategi nasional pertama di Indonesia tentang ekonomi sirkular. Jadi, apa itu sebenarnya ekonomi sirkular? Apa perbedaannya dengan ekonomi linear?

Model ekonomi linear (konvensional) yang berlaku saat ini merupakan ekonomi berbasis "*take-make-waste*" dimana sumber daya alam di ekstraksi, digunakan, lalu akan dibuang kembali sebagai limbah, seringkali tanpa pengolahan terlebih dahulu. Model ini tentunya dinilai tidak efektif bagi keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi sirkular merupakan sebuah model produksi dan konsumsi yang bertujuan untuk mengurangi limbah hingga seminimal mungkin mulai dari berbagi, menyewakan, menggunakan kembali, memperbaiki, merenovasi, dan mendaur ulang sebagian/ seluruh produk dan material untuk mempertahankan utilitas dan nilai produk yang terbaik. Model ini dilakukan hingga menghasilkan suatu lingkaran produksi-konsumsi yang hampir tertutup (*closed-loop*).

Namun, tidak seperti model ekonomi linear, ekonomi sirkular merupakan sebuah model produksi dan konsumsi yang bertujuan untuk mengurangi limbah hingga seminimal mungkin mulai dari berbagi, menyewakan, menggunakan kembali, memperbaiki, merenovasi, dan mendaur ulang sebagian/ seluruh produk dan material untuk mempertahankan utilitas dan nilai produk yang terbaik. Model ini dilakukan hingga menghasilkan suatu lingkaran produksi-konsumsi yang hampir tertutup (*closed-loop*).

Ekonomi sirkular dimaksudkan untuk mengurangi dampak lingkungan yang timbul akibat produksi, meningkatkan keberlanjutan dari pasokan bahan baku, peningkatan daya saing, inovasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan. Penciptaan model ekonomi sirkular ini berpotensi untuk dapat menumbuhkan peluang ekonomi global senilai USD 4,5 Triliun, dengan potensi tambahan PDB untuk Indonesia sebesar Rp 593 T – 638 T pada tahun 2030. Selain manfaat ekonomi, manfaat lingkungan juga dapat dirasakan Indonesia melalui estimasi pengurangan volume sampah sebesar 52 persen, penurunan 126 juta ton emisi CO₂, serta manfaat sosial yaitu penciptaan lapangan kerja kumulatif sebesar 4,4 juta pada tahun 2030.

Model ekonomi ini juga dapat diarahkan sebagai solusi pemulihan dan ketahanan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 melalui efisiensi penggunaan sumber daya, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB. Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah menetapkan lima sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia, mulai dari industri makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, dan ritel.

Namun, perubahan menuju ekonomi sirkular bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan sulitnya merubah faktor – faktor seperti model pembiayaan, keterampilan Sumber Daya Manusia, perilaku konsumen, serta pengembangan model bisnis dan kelembagaan ke arah paradigma yang baru.

Membangun Ekonomi Sirkular

Menurut studi dari *World Resources Institute* (WRI), terdapat 3 metode utama penerapan ekonomi sirkular:

1. Konsumsi Lebih Sedikit (*consume less*): Mengubah paradigma bahwa konsumsi lebih banyak itu lebih baik.
2. Konsumsi Lebih Baik (*consume better*): Pergeseran ke arah konsumsi yang lebih baik ini menawarkan peluang untuk beradaptasi dengan model bisnis yang baru dan inovatif.
3. Ciptakan Perubahan Sistemik (*create systemic change*): Dibutuhkan perubahan dari sisi kebijakan, terutama inovasi dan insentif dalam penggunaan kembali atau mendaur ulang material.

Kementerian PUPR sendiri merupakan salah satu kementerian yang bertugas dalam tata laksana sektor konstruksi di Indonesia, dan telah memulai upaya penerapan *green construction* dalam mendukung penciptaan ekonomi sirkular. *Green construction* yang dimaksud merupakan proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan

Kementerian PUPR sendiri merupakan salah satu kementerian yang bertugas dalam tata laksana sektor konstruksi di Indonesia, dan telah memulai upaya penerapan *green construction* dalam mendukung penciptaan ekonomi sirkular.

keselamatan para pekerja, efisiensi sumber daya untuk bahan baku material, pengurangan volume limbah dan mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap kualitas lingkungan.

Fokus utamanya adalah menerapkan konsep keberlanjutan dan peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Pertumbuhan pembangunan yang pesat pasca pandemi COVID-19 dapat dimanfaatkan



Pembangunan Gedung Utama Kementerian PUPR, salah satu contoh penerapan green construction di Indonesia.

Sumber: Kompu BPIW

sebagai peluang untuk dapat menyebarkan penerapan praktik kebijakan berkelanjutan secara lebih luas di Indonesia. Adapun sektor konstruksi dapat menerapkan *green construction* dalam seluruh tahapan siklus hidup bangunan, mulai dari ekstraksi dan pemrosesan bahan baku hingga daur ulang dan/atau pemulihan material bangunan. Siklus hidup bangunan secara lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber:

1. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits>

economy-definition-importance-and-benefits

2. <https://wri-indonesia.org/en/blog/how-build-circular-economy>;

3. <https://indonesiacef.id/en/about/>;

4. https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en;

5. <https://www.nytimes.com/2019/10/23/travel/copenhagen-ski-hill-powerplant.html>;

6. "Closing The Loop: New Circular Economy Package", European Parliament Briefing, Jan 2016

7. "Ekonomi Sirkular untuk Mendukung Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Menuju Visi Indonesia 2045", Paparan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dalam FGD 1 RPJPN, Okt 2021

8. "Agenda Pembangunan Wilayah Menuju Visi Indonesia 2045", Paparan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik dalam FGD 1 RPJPN, Okt 2021

Siklus hidup bangunan yang berorientasi pada *green construction* ini fokus pada kegiatan manajemen material, limbah dan hemat energi. Metode perwujudannya antara lain dapat dilakukan melalui:

- Penggunaan bahan/material bangunan yang lebih ramah lingkungan;
- Penggunaan peralatan baru dan lebih hemat bahan bakar untuk efisiensi;
- Sumber bahan kimia tidak beracun yang digunakan di lokasi pembangunan;
- Pembuangan limbah B3 dengan cara yang bijaksana dan aman;
- Pengurangan sebanyak mungkin limbah melalui proses konstruksi sirkular; dan
- Daur ulang materai seperti puing – puing konstruksi, beton dan kayu.

Terwujudnya sistem ekonomi sirkular yang didukung oleh seluruh sektor (termasuk sektor konstruksi

sebagai pilar pembangunan) merupakan kunci dalam melakukan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia 2045. Kunci keberhasilan pengembangan ekonomi sirkular adalah adanya kolaborasi multi pihak, mulai dari sisi pemerintah, praktisi dan akademisi, industri, serta masyarakat. Dengan tercapainya model ekonomi sirkular di Indonesia, diharapkan sektor ekonomi dan lingkungan hidup dapat berjalan harmonis secara berkelanjutan.



A photograph of an award ceremony. An elderly man in a black traditional Indonesian uniform with white and gold embroidery is presenting a red award to a younger man in a black uniform and red headpiece. The younger man is holding a framed certificate that says "PENCIHRAAN". Other men in traditional attire are visible in the background.

Selamat atas Terpilihnya

Akhya Farizal, S.T., M.ENG. (Sekretariat BPIW)
sebagai Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR Tahun 2021



Rencana Kolam Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

Sumber: BPPW Jambi

Atasi Pencemaran Limbah Domestik, Kota Jambi Bangun IPAL Skala Kota Dengan Teknologi MBBR



oleh:

Evry Biaktama Meliala, S.T., M.S.E., M.A.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi

Pencemaran air merupakan salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi oleh masyarakat di kota besar, pencemaran air sangat erat sekali kaitannya aktifitas penduduk di perkotaan khususnya di permukiman. Dalam kehidupan keseharian masyarakat pastinya membutuhkan air bersih untuk aktifitas sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci dan berbagai aktifitas lainnya. Sekitar 80 persen dari hasil aktivitas tersebut dibuang dalam bentuk air tercemar yang dikategorikan sebagai air limbah Domestik yang tanpa kita sadari telah mencemari lingkungan sekitar karena tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan semakin tingginya kepadatan rumah penduduk, mendorong pemerintah kota Jambi untuk meningkatkan pelayanan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat. Saat ini pengolahan limbah domestik untuk masyarakat kota Jambi mayoritas masih dilayani melalui sistem setempat dan didominasi melalui pengolahan tangki septik individual.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa mayoritas tangki septik individual yang digunakan masyarakat saat ini belum memenuhi persyaratan teknis, sehingga hal ini memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. Untuk menangani hal tersebut, saat ini kota Jambi sedang melaksanakan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui *Project Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP)*.

Kegiatan ini dibiayai melalui pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan juga APBN melalui anggaran Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi.

Kegiatan ini dibiayai melalui pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dan juga APBN melalui anggaran Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi.

Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) ini sudah diinisiasi sejak tahun 2012 yang lalu yaitu melalui peminatan pemerintah daerah terhadap SPALD-T di beberapa kota. Pada saat itu terpilih lima kota yaitu Pekanbaru, Jambi, Palembang, Cimahi dan Makassar. Pada tahun 2013, melalui dana APBN, Pemerintah Pusat menyiapkan *Detail Engineering Design* (DED) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan di Kota Jambi dan Pekanbaru sedangkan DED untuk Kota Makassar dan Cimahi dibiayai melalui Hibah dari Pemerintah Australia. Hasil pembahasan akhir ditetapkan bahwa penerima program SPALD-T melalui program MSMIP ini adalah Kota Pekanbaru, Kota Jambi dan Kota Makassar.

Secara khusus pembangunan SPALD-T untuk Kota Jambi sudah dimulai sejak akhir tahun 2020 yang lalu yaitu melalui pembangunan jaringan perpipaan dan IPAL. Pelaksanaan pembangunan SPALD-T kota Jambi ini dibagi menjadi tiga paket kegiatan yaitu dua paket Jaringan Perpipaan dikerjakan oleh PT. Waskita Karya dan PT. Adhi Karya serta satu Paket IPAL yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya j.o. Memiontech. Adapun total biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 630 miliar.

Sistem pengolahan air limbah Kota Jambi akan melayani sebanyak dua Kecamatan besar di Kota Jambi yaitu Kecamatan Pasar dan Kecamatan Jambi Timur. Air limbah domestik yang dihasilkan dari daerah layanan

Pembangunan SPALD-T untuk Kota Jambi sudah dimulai sejak akhir tahun 2020 yang lalu yaitu melalui pembangunan jaringan perpipaan dan IPAL. Pelaksanaan pembangunan SPALD-T kota Jambi ini dibagi menjadi tiga paket kegiatan

tersebut nantinya akan disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan panjang ±43 km yang dilaksanakan dengan mekanisme *Jacking* (galian bawah tanah) dan *Open Cut* (galian terbuka) untuk dialirkan menuju Rumah Pompa di Kelurahan Rajawali. Selanjutnya air limbah dipompa menuju bangunan IPAL yang berada di Kelurahan Kasang untuk selanjutnya diolah dan air hasil olahannya akan dibuang ke badan air setelah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Diperkirakan pada awal tahun 2023 IPAL ini akan mulai dioperasikan sehingga pada awal 2023 Kota Jambi akan memiliki pengolah air limbah domestik skala kota pertama yang dibangun di Provinsi Jambi. Khusus untuk IPAL, mekanisme pelaksanaannya juga dilaksanakan secara *Design and Build* (rancang bangun) dan mengacu kepada *Fidic Yellow Book*, sehingga ini juga merupakan kegiatan pembangunan air limbah pertama yang dilelangkan secara *Design and Build* melalui pendanaan APBN.



Lokasi IPAL Kota Jambi

Sumber: BPPW Jambi

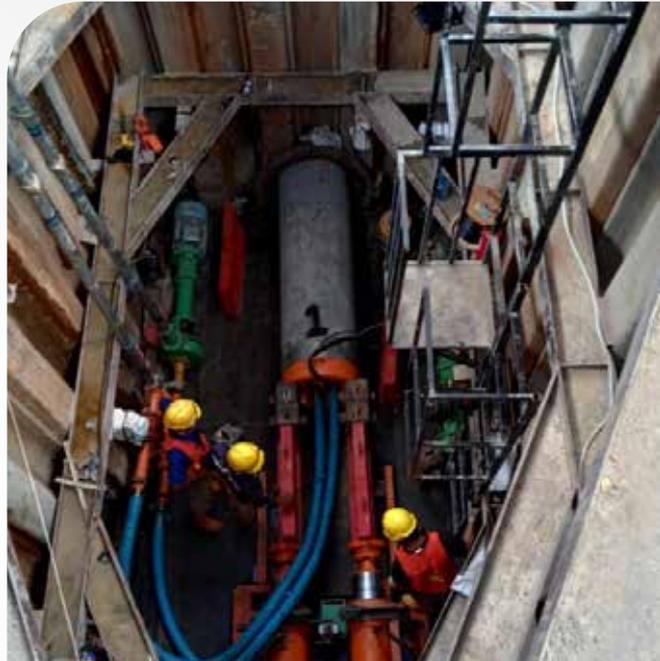
Dengan dibangun IPAL Skala Perkotaan di Kota Jambi ini, harapannya masalah lingkungan khususnya sanitasi dapat tertangani dengan baik dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

IPAL Kota Jambi akan dibangun diatas lahan Pemerintah Kota Jambi dengan luas area 5,31 hektar. Dibangun diatas lahan berjenis rawa, struktur bangunan IPAL didesain dengan struktur *slab on pile* dimana bangunan akan berdiri diatas tiang pancang dengan elevasi 4 meter diatas tanah.

Hal ini disebabkan karena berdasarkan data kala ulang banjir 50 tahunan di Kota Jambi, ketinggian air banjir tertinggi di lokasi pembangunan adalah setinggi 3 meter, sehingga untuk mengantisipasi tingginya muka air banjir di lokasi pembangunan, maka ditetapkan tinggi elevasi IPAL berada di elevasi +4 meter, sehingga nantinya jika terjadi kenaikan muka air, bangunan IPAL tidak terkena dampak yang signifikan, dikarenakan bangunan IPAL ini nantinya juga akan beroperasi selama 24 jam untuk melayani pembuangan air limbah domestik warga Kota Jambi.

Didesain dengan cakupan layanan yang luas, IPAL di Kota Jambi dapat menampung air limbah dari ± 10.300 Sambungan Rumah, dengan debit 7.600 m³/hari. IPAL Kota Jambi didesain menggunakan teknologi *Moving Bed Biofilm Reactor* (MBBR). MBBR merupakan teknologi pengolahan air limbah secara biologis dimana air limbah akan diolah oleh mikrobiologi yang tumbuh pada permukaan media membentuk lapisan film yang berfungsi sebagai semacam filter untuk air limbah.

Pengolahan akan dilanjutkan ke proses sedimentasi untuk mengendapkan lumpur aktif yang terbentuk dari proses biologis, dan akan didesinfeksi sebelum akhirnya dapat dibuang ke badan air secara aman dan memenuhi baku mutu. Teknologi ini dinilai cocok dengan karakteristik air limbah di Kota Jambi dan secara pengoperasian tergolong mudah dan relatif murah.



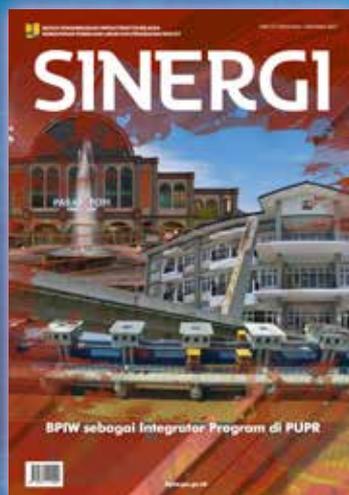
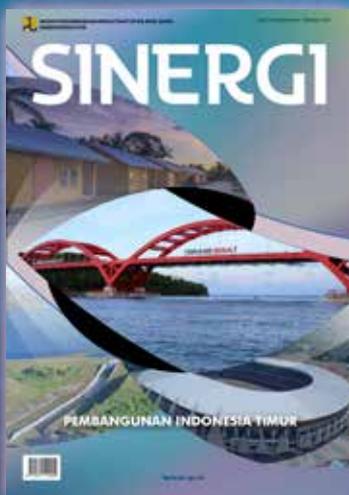
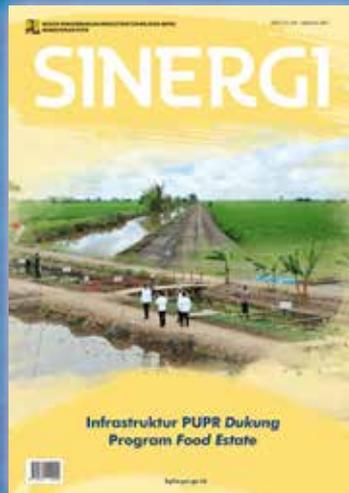
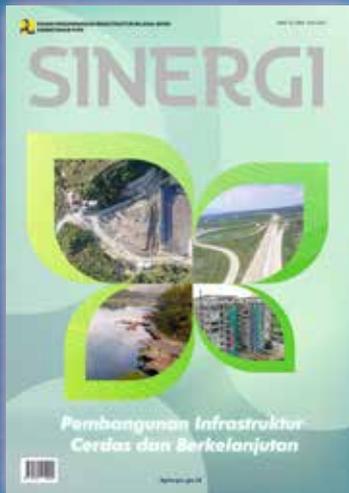
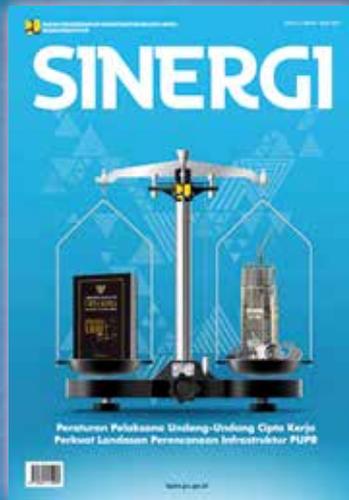
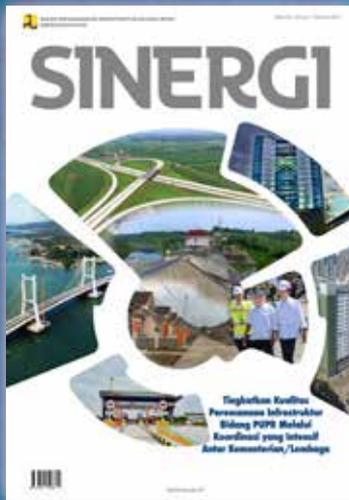
Pekerjaan Pemasangan Pipa Metode Jacking
Sumber: BPPW Jambi

Uniknya, sistem pengolahan air limbah kota Jambi ini nantinya tidak hanya dapat melayani air limbah domestik melalui jaringan perpipaan saja, namun dapat melayani air limbah domestik non perpipaan (lumpur tinja), sehingga SPALD ini nantinya juga akan berfungsi sebagai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan kapasitas 100 liter/detik.

Untuk memastikan bahwa pemda dapat mengoperasikan IPAL ini kedepannya, maka setelah pembangunan IPAL ini selesai, akan dilaksanakan pendampingan operasional selama satu tahun kepada calon operator IPAL yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Kota Jambi nantinya, sehingga setelah dilakukan pelatihan, diharapkan Pemerintah Kota Jambi akan dapat mengoperasikan IPAL ini secara penuh dan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada.

Dengan dibangun IPAL Skala Perkotaan di Kota Jambi ini, harapannya masalah lingkungan khususnya sanitasi dapat tertangani dengan baik dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

KALEIDOSKOP 2021



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN SUMBUH DAN PERUMAHAN RAKYAT



Sumber: Website BPIW

bpiw.pu.go.id



Ulasan

Ari Purwani ST, M.Com

Ketua Tim Pelaksana Pengembangan
Pegawai, Sekretariat BPIW

Sepanjang tahun 2015 hingga 2021, Pemerintah gencar membangun infrastruktur sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Terlebih, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Alokasi pendanaan diberikan untuk proyek-proyek infrastruktur guna konektivitas dan pengembangan wilayah yang membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Merespon arahan Bapak Menteri pada kunjungannya ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Bulan September 2021, BPIW telah melaksanakan Kunjungan Lapangan Tahap II ke pada tanggal 30 November 2021. Kunjungan lapangan dilakukan ke Bendungan Karian dan Koridor Tol Serang-Panimbang mengingat keduanya infrastruktur tersebut merupakan PSN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tim BPIW atas pembangunan infrastruktur PUPR, khususnya terkait bendungan dan jalan tol.

Kunjungan BPIW yang pertama adalah lokasi on-going project Bendungan Karian. Bendungan Karian yang terletak di Desa Pasirtanjung, Kabupaten Lebak didesain untuk 3 tujuan utama, yaitu melayani kebutuhan air baku, irigasi dan pengendali banjir. Tim BPIW berkesempatan melihat progres pembangunan

BPIW Kunjungi Pembangunan Bendungan dan Tol di Banten

Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat memberikan *multiplier effect*, seperti meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Banten dan sekitarnya.

Hal itu terungkap dalam kunjungan lapangan yang diikuti 63 pejabat dan jajaran staf BPIW Kementerian PUPR ke Bendungan Karian dan Jalan Tol Serang-Panimbang, Provinsi Banten, Selasa, 30 November 2021. Kunjungan jajaran BPIW yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra ini, mengawali kunjungan ke proyek pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten dan berakhir dengan kunjungan ke Jalan Tol Serang-Panimbang.(ris)

bendung dengan tampungan 314 juta m3 ini dengan didampingi oleh Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, Bapak Ketut Jayada. Bendungan berpotensi menyediakan kebutuhan RKI (rumah tangga, perkotaan, industri dan perikanan) sebesar 9,1 m3/detik ke wilayah Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan sebesar 5,5 m3/detik ke wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Cilegon serta Kabupaten Serang.

Lokasi kunjungan kedua adalah Jalan Tol Serang – Panimbang seksi 1 Serang - Rangkasbitung. Ruas sepanjang 26,5 km telah beroperasi dan diharapkan mampu mempercepat pembangunan kawasan sekitarnya sekaligus meningkatkan konektivitas. Lebih lanjut, keberadaan tol diharapkan menjadi pengungkit perekonomian di Provinsi Banten, terutama Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Pada lokasi tersebut, Tim Bpiw melihat adanya potensi peningkatan laju kendaraan harian yang lebih tinggi apabila lokasi menuju dan keluar tol terkoneksi dengan hub-hub yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi wilayah. Kedepannya, jajaran BPIW pada khususnya mampu lebih cepat, lebih cermat dan lebih awal mengidentifikasi isu dan potensi pengembangan wilayah serta terlibat dalam perencanaan pemrograman penyelenggaraan infrastruktur.(')



BPIW Gelar Workshop Pengolahan Data

Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPIW menggelar *Workshop* Pengolahan Data Pengembangan Infrastruktur Wilayah Melalui Power BI, selama 2 hari, beberapa waktu lalu.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan *workshop* tersebut merupakan bagian dari penguatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPIW. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke kantor BPIW beberapa waktu yang lalu. "Kala itu Menteri PUPR meminta BPIW meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi tantangan kedepan," terangnya.**)



Ulasan

Akhyar Farizal, ST, M.Eng

Ketua Tim Pelaksana Data dan Informasi, Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPIW

Saat ini BPIW dituntut untuk dapat menghasilkan *output* yang berkualitas dimana kajian yang dirumuskan harus memberikan kebermanfaatannya yakni terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan program infrastruktur PUPR. Sampai dengan tahun 2020 BPIW sudah menghasilkan lebih dari 266 produk rencana pengembangan infrastruktur wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain menghasilkan kajian yang berisi skenario dan strategi pengembangan wilayah, BPIW harus secara konsisten memastikan output yang dihasilkan dapat terpublikasikan dengan baik.

Power BI adalah *Software Intelligence* bisnis besutan Microsoft yang dapat mendukung optimalisasi penyampaian hasil kajian pengembangan wilayah sehingga menjadi lebih informatif. Power BI ini mampu mengelola data tabular yang kompleks sehingga dapat diterjemahkan secara sederhana dengan visualisasi grafis yang interaktif. Aplikasi ini dapat mengintegrasikan data statistik dan geospasial sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait skenario dan konsep pengembangan wilayah.

Data dan informasi di lingkungan BPIW harus dapat dikelola secara bersama sama. Oleh karena itu, seluruh pegawai di Internal BPIW seharusnya memiliki kompetensi yang sama di

dalam mengelola dan menganalisis data BPIW. *Workshop* pengolahan data pengembangan wilayah melalui power BI merupakan salah satu instrumen peningkatan kualitas SDM di lingkungan BPIW. Kegiatan ini diharapkan dapat mengakselerasi pengelolaan data di lingkungan BPIW sehingga menjadi efektif dan efisien.

Pelaksanaan *workshop* Power BI selama dua hari yang diinisiasi oleh Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik harus ditindaklanjuti dengan pengaplikasian pengelolaan data terhadap kajian yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh BPIW. Pembelajaran terkait Teknik Pengelolaan data dan Teknik visualisasi data melalui Power BI hendaknya dapat langsung dimanfaatkan oleh seluruh peserta sehingga *output* yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh para *stakeholders*.

Kedepan Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik melalui sub koordinasi data dan informasi BPIW akan terus bermetamorfosis dalam rangka mewujudkan data dan informasi yang berkualitas melalui pemutakhiran *hardware*, *software* dan *brainware*. Pemutakhiran pengelolaan data akan terus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung perwujudan *output* BPIW yang berkualitas.**)

Kepala BPIW Dialog dengan Seluruh Jajaran Pegawai

BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja dengan meningkatkan kekompakan seluruh jajaran, guna dapat memenuhi tugas dan fungsi dalam melaksanakan planning dan programming di Kementerian PUPR. Demikian terungkap dalam "Dialog Bersama Kepala BPIW" yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan BPIW yang digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Senin, 15 November 2021.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat membuka acara menyatakan, keberadaan BPIW senantiasa diharapkan mampu menunjukkan peran sebagai unit organisasi (Unor) yang kuat dan berwibawa. "Bapak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono,-red) telah menyampaikan BPIW dibentuk agar menjadi organisasi yang berpengaruh dalam memberi masukan planning, programing dan budgeting pembangunan infrastruktur PUPR," tutur Rachman Arief di hadapan jajaran BPIW.(*)

Harapan mengenai peningkatan koordinasi dan kerja sama antara atasan dan bawahan dan juga sesama rekan kerja juga tak luput disampaikan. Kepala BPIW berharap masing-masing individu perlu menunjukkan empati dan kepedulian satu sama lain sehingga terciptanya kerjasama yang solid serta berharap keterbukaan antara atasan dan bawahan untuk dapat menyampaikan ide-ide, gagasan, aspirasi, dan temuan di lapangan. Dengan demikian, kebutuhan yang terjadi di lapangan dapat terdeteksi dan senantiasa mampu berinovasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Setelah sesi dialog berlangsung, semangat pada PNS dan CPNS diperkuat dengan adanya sesi edukasi bersama Psikolog Azhar ElHami, M.Si., Psikolog, yang bertajuk "*The Secret of Great Performance*". Acara ini dibuka dengan survei terkait kondisi dan harapan dari PNS dan CPNS terkait BPIW idaman yang ingin mereka capai. Hasil survei tersebut diharapkan dapat menjadi refleksi diri dan pembelajaran mengenai kondisi BPIW. Setelah itu, diberikan edukasi terkait motivasi kerja dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja, pentingnya kerja sama dengan rekan kerja lainnya, hingga pentingnya komunikasi yang efektif dalam kerja sama. (**)



Sumber: Acung BPIW

bpiw.pu.go.id



Ulasan

Setyo Purnomo SE, MA

Subkoordinator TU Kepegawaian,
Setba BPIW

BPIW Kementerian PUPR mengadakan Kegiatan Dialog bersama Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra yang dilanjutkan dengan Edukasi "*The Secret of Great Performance*" Psikolog, Azhar El Hami, M. Si., Psikolog. Kegiatan ini dilakukan Senin, 15 November 2021 di Auditorium Kementerian PUPR dihadiri oleh para PNS dan CPNS dari unsur Pejabat Pengawas, Sub Koordinator, Ketua Tim dan Pelaksana BPIW.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dari BPIW untuk mendukung pada PNS dan CPNS untuk dapat bekerja dengan optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tidak dapat dipungkiri PNS dan CPNS perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja BPIW. Diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, budaya dan norma organisasi serta memahami perbedaan usia dan latar belakang agar tetap dapat bekerja selaras dalam mencapai tujuan organisasi. Acara ini dimulai dengan penyampaian arahan dan harapan dari Kepala BPIW Kementerian PUPR mengenai kinerja ideal yang diharapkan dan arahan terkait penekanan mengenai tugas dan fungsi BPIW sebagai pengarah pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia serta pesan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, agar BPIW dapat mengambil peran vital dan ketidakhadiran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memunculkan rasa kehilangan dan ketimpangan di Kementerian PUPR.



Target Penanganan Kawasan Strategis 2022-2024

Guna meningkatkan kinerja perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini melakukan penyusunan rumusan strategi untuk pencapaian target penanganan kawasan strategis tahun 2022-2024 dalam rangka memenuhi target Renstra BPIW 2020-2024 serta merespon dinamika kebijakan nasional.

Hal itu terungkap dalam Pembahasan Strategi Pencapaian Target Penanganan Kawasan Strategis Tahun 2022-2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu. (**)



Ulasan

Alis Listalatu

Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan, Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan

Dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020-2024 serta merespon dinamika pembangunan dan kebijakan nasional, diperlukan strategi pencapaian target penanganan kawasan strategis yang akan dilakukan oleh BPIW. Pada Tahun 2021, Sekretariat BPIW melakukan penyusunan rumusan strategi tersebut dalam rangka pemenuhan target Renstra BPIW untuk tahun 2022-2024 yang sejalan dengan agenda nasional. Pembahasan rumusan strategi ini diselenggarakan pada Selasa, 19 Oktober 2021 dengan metode *hybrid*, secara *offline* dilaksanakan di Hotel Intercontinental Jakarta dan *virtual* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyampaikan bahwa dalam penyusunan strategi tersebut diperlukan perumusan kriteria kawasan strategis yang akan ditangani. Hal ini agar memudahkan BPIW dalam memilih kawasan strategis untuk dikaji pada tahun mendatang. Seiring dengan perubahan kondisi lapangan dan dinamika kebijakan yang terjadi, diperlukan kesepakatan baru untuk kriteria kawasan strategis, antara lain dari sisi *urgency*, *readiness criteria*, manfaat, komitmen pemerintah daerah, dan kesiapan investor membangun kawasan.

Di samping itu, agar konsep pengembangan kawasan strategis dan rencana program pembangunan infrastruktur

yang dihasilkan oleh BPIW dapat diimplementasikan, maka BPIW perlu lebih banyak berinteraksi dengan Unor Teknis di lingkungan Kementerian PUPR serta Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dalam hal melakukan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Renstra BPIW 2020-2024, terdapat 249 kawasan strategis yang merupakan amanat RPJMN 2020-2024 serta Perpres mengenai percepatan pembangunan ekonomi. Hingga tahun 2021, BPIW telah menyusun dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR untuk 208 kawasan.

Kegiatan perumusan strategi penanganan kawasan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dokumen perencanaan yang telah disusun BPIW periode 2015-2021 dan merumuskan tipologi penanganan kawasan berdasarkan perkembangan kawasan dan prioritas penanganan. Strategi penanganan kawasan yang dirumuskan tidak lagi menyusun dokumen rencana untuk masing-masing kawasan, namun sinergis dengan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah/RPIW (berupa *clustering* kawasan/wilayah/koridor), sehingga hasil kajian kegiatan ini dapat digunakan untuk melengkapi RPIW yang sedang disusun.



Internasional Sirkuit Mandalika, Lombok NTB

Sumber: Kompu BPIW

Sirkuit Mandalika Teknologi Tercanggih Pengaspalan Lintasan Balap

Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata memiliki trek super canggih. Aspal jalur balapan tersebut dibangun dengan memanfaatkan teknologi aspal terdepan di dunia. Sirkuit dengan lintasan utama sepanjang 4,310 kilometer itu memiliki 17 tikungan yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk dengan inovasi sistem pengaspalan canggih.

Pengaspalan menerapkan campuran aspal khusus terbaik dunia yang biasa digunakan untuk sirkuit balap, yaitu *Stone Mastic Asphalt* (SMA), saat ini hanya digunakan di 4 (empat) sirkuit saja. Keempatnya itu Sirkuit Mandalika, Silverstone di Inggris, Yas Marina di Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia.

Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad mengungkapkan, inovasi pengaspalan canggih itu salah satunya menggunakan metode *Building Information Modelling* (BIM) untuk memenuhi spesifikasi khusus di pembangunan proyek Sirkuit Mandalika. Pengaspalan dilakukan secara teliti dan terencana karena pengaturan rute dan ketebalan seluruhnya dilakukan secara otomatis dan tidak ada waktu tunggu untuk suplai *hotmix* ke *finisher*.

Untuk menjaga mutu, PT PP menggunakan 2 paver yang dikendalikan secara otomatis dengan berbasis *automatic hydraulic controler* dengan alat yang bernama MMGPS. PT PP juga menggunakan 2 *finisher* agar tidak terjadi *cold join* sambungan memanjang. "Berkat kualitas dan proses yang canggih, jalan Sirkuit Mandalika diklaim dapat digunakan dengan kecepatan puncak hingga 310 kilometer per jam. Tentunya, tidak hanya dapat digunakan dengan kecepatan tinggi namun Sirkuit Mandalika juga tetap memperhitungkan keamanan para pengguna lintasan dengan sangat baik," ujar Novel dikutip dari keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

Selain lintasan balap, lingkup pembangunan di Sirkuit Mandalika dilakukan juga mencakup beberapa hal,

yakni *Track Lane, Verge, Run off Asphalt, Run off Grass, Gravel Bed, Service Road, Drainage, Concrete Barrier, Tunnel, Race Control, Gantry, Medical Center, Spectator Fences, dan Observation Deck*. Sirkuit Mandalika memiliki area paddock yang dapat menampung sampai dengan 50 garasi.

Selain itu, sirkuit tersebut memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak lebih dari 50.000 tempat duduk dan 138.000 area berdiri. PTTP pun ditegaskan telah menyelesaikan pembangunan lintasan utama MotoGP itu dengan standar mutu dari *Federation Internationale*

de Motorcyclisme (FIM). Dengan memperoleh kategori sirkuit kelas A untuk dapat digunakan dalam event grand prix.

Proyek pembangunan Sirkuit Mandalika ini dikerjakan sejak bulan Juli 2020 sampai Agustus 2021 menjadi pembangunan lintasan sirkuit yang tercepat. "Berkat inovasi serta teknologi yang digunakan dalam pembangunannya, proyek Sirkuit Mandalika ini memperoleh 3 rekor penghargaan dari MURI," ujarnya.

(dari berbagai sumber/ris)



Kunjungan Kepala BPIW ke Internasional Sirkuit Mandalika, Lombok NTB



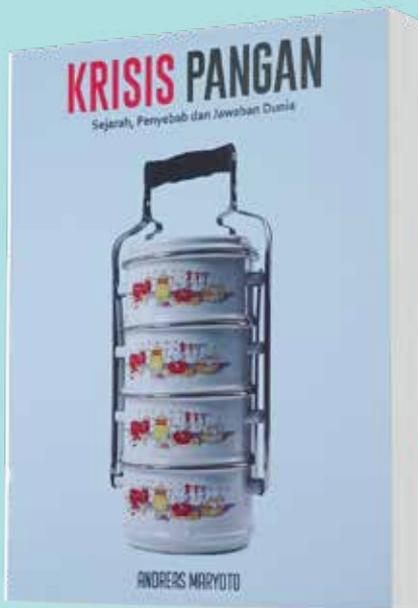
Sumber: Kompu BPIW



Internasional Sirkuit Mandalika, Lombok NTB

Sumber: viva.co.id

Krisis Pangan: Sejarah Penyebab dan Jawaban Dunia



Judul Buku	: <i>Krisis Pangan: Sejarah, Penyebab, dan Jawaban Dunia</i>
Pengarang	: Andreas Maryoto
Penerbit	: Kagama Virtual
Tahun Terbit	: 2019
ISBN	: 978-623-7513-00-1

Buku yang ditulis oleh seorang Wartawan Kompas, Andreas Maryoto, ini mengangkat isu krisis pangan yang terjadi di dunia. Sebagai buku yang ditulis oleh wartawan, buku ini secara konten tidak terlalu kaku ataupun bernuansa akademik. Isi buku ini tidak bergelut dengan teori-teori krisis pangan, tetapi lebih mendekati laporan jurnalistik lapangan yang didapat dari pengalaman sebagai wartawan sejak tahun 2000.

Penulis menghadirkan pembahasan dari kaca mata seorang jurnalis, yang tidak menghadirkan analisis, kajian mendalam, apalagi solusi. Namun ia menghadirkan fakta di lapangan yang mungkin kita baru ketahui, disajikan dengan sentuhan referensi, pengalaman, serta empati mendalam atas nasib petani. Dalam beberapa bagian, penulis menghadirkan kisah-kisah nyata yang terjadi di masyarakat dari hasil jurnalisme investigatif yang pernah ia lakukan di lapangan.

Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka dan wawancara kepada narasumber ahli. Hal ini menjadikan fakta yang disajikan bukanlah sekedar fakta, melainkan didalami dan dikaitkan dengan bidang lain seperti sosial, politik, dan budaya.

Penulis yang juga berlatar belakang pendidikan Teknologi Pertanian, sedikit banyak mencoba menawarkan saran. Ia berangkat dari kenyataan ironis bahwa di negara pertanian namun semua komoditas pertanian diimpor dari luar. Penulis mencoba menawarkan solusi bahwa sudah saatnya pemerintah memberikan fasilitas bagi peningkatan usaha pertanian lewat perbankan maupun keberpihakan kepada profesi petani.

Secara struktur, buku ini terbagi menjadi enam bab. Bab pertama membahas pengertian dan sejarah krisis pangan baik di nusantara maupun di dunia. Bab kedua memaparkan tanda-tanda krisis pertanian. Di

sini dijelaskan beberapa sinyal akan terjadinya krisis pangan, di antaranya lonjakan harga yang tiba-tiba, kondisi pemuda perdesaan yang frustrasi, berubahnya lahan persawahan, dan perpolitikan yang tidak mempedulikan petani.

Bab ketiga menjelaskan tentang kondisi yang mendorong krisis pertanian. Dalam bab ini disinggung masalah yang terjadi di bidang pertanian misalnya sulitnya mendapatkan bibit unggul, ancaman kekeringan, adanya hama, persoalan pupuk, fluktuasi harga BBM, dan lain-lain.

Bab keempat membahas tentang perdagangan yang memicu krisis pangan. Di sini dipaparkan betapa posisi petani sungguh sangat sulit, hingga disebut petani yang miskin mensubsidi orang kaya, karena begitu murah bahan makanan yang berasal dari petani. Ditambah lagi kebijakan impor beras pemerintah yang makin mencecik para petani. Penulis mengulas agak mendalam tentang beras dalam bab ini karena kebijakan beras menurutnya adalah hal yang politis dan menyudutkan petani.

Bab kelima membahas tentang ancaman krisis pangan yang masih kuat. Penulis memulai pembahasan mengenai adanya problem pangan yang terjadi di China, kemudian adanya ancaman lonjakan harga pangan yang terus mengintai.

Bab keenam penulis memaparkan bagaimana upaya menangani krisis pangan. Penulis menyebut beberapa upaya yang juga dilakukan pemerintah di berbagai negara seperti upaya diplomasi hingga pembudidayaan padi hibrida. Penulis juga menyampaikan saran seperti pengendalian impor beras, kebijakan harga yang memberi insentif pada petani, dan perlunya pengkajian ulang bidang pertanian pangan terkait adanya pemanasan global. Terakhir penulis juga menyerukan kembali upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, karena hal itu adalah pilihan terakhir yang kita miliki.

(Mutri)





KUIS EDISI 55 November – Desember 2021

Buat kalian Pembaca setia pasti sudah hafal dengan kepanjangan istilah terkait pengembangan wilayah yang pernah di muat pada Buletin Sinergi, sekarang waktunya menjajal kemampuan daya ingat kalian nih!

1. Apa kepanjangan dari NUDP ?
2. Apa kepanjangan Rakorbangwil ?
3. Apa kepanjangan ITMP ?

Jawaban Kuis Edisi 54 September-Oktober 2021

Jembatan Merah Youtefa, Jayapura - Papua

Puncak Waringin, Labuan Bajo - NTT

Bypass Bandara Internasional Lombok – Mandalika, Lombok - NTB

Pemenang Kuis Edisi 54 September-Oktober 2021
Vadia Melistiawanti – Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Feri N., Jakarta

Dua orang pemenang akan mendapatkan souvenir menarik dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : hkkompu.bpiw@pu.go.id Jawaban juga dapat disampaikan melalui WhatsApp No: 0838-0874-7276 disertakan scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 56, Januari-Februari 2021

Tips Liburan Masa Pandemi Tingkatkan Literasi

*Liburan saat pandemi
Sumber: unsplash.com*

Pandemi Covid-19 sudah dua tahun ini melanda tanah air. Pasang surut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus terjadi dan mengakibatkan aktivitas di sekolah, tempat wisata, bahkan di perkantoran menjadi terbatas. Namun di akhir tahun 2021 ini, kasus aktif Covid-19 cenderung menurun. Meskipun ada ancaman varian baru "Omicron", namun aktivitas masyarakat sudah makin dilonggarkan.

Mungkin di antara kita sudah merasa bosan dengan pembatasan gerak dan aktivitas sehingga ingin mencoba liburan ke luar rumah? Berikut ini adalah beberapa tips yang kami hadirkan untuk Anda, yang ingin mencoba liburan ringan di masa pandemi dengan nilai plus meningkatkan literasi.

1. Berlibur Ke Museum

Salah satu tempat yang minimal sekali dalam seumur hidup, setidaknya kita kunjungi adalah museum. Mengapa demikian? Karena museum adalah objek wisata yang mengedepankan unsur pendidikan, dan pelestarian warisan budaya. Museum juga menjadi pusat informasi dan dokumentasi warisan budaya bangsa.

Di masa pandemi ini berkunjung ke museum adalah pilihan yang tepat karena suasana yang tidak terlalu berdesakan terutama di hari kerja. Untuk kalian yang berlokasi di Jakarta, tak kurang ada puluhan museum dan cagar budaya yang bisa dikunjungi, di antaranya dapat digali informasinya di tautan ini: <https://www.jakarta-tourism.go.id/blog/category/enjoy-wisata-budaya>.

Setidaknya ada empat hal yang menarik dari kunjungan ke museum, yaitu:

Jangan lupakan protokol kesehatan agar terhindar dari virus covid-19



Sumber: unsplash.com

a. Bertambahnya wawasan dan informasi baru.

Ada berbagai jenis museum mulai dari sejarah, seni, militer, biografi, biologi dan lain-lain. Masing-masing jenis museum akan memberi informasi unik yang menambah pengetahuan kita.

b. Menghilangkan penat

Suasana museum yang sepi, tata letak yang rapi, ditambah dengan nilai sejarah atau keunikan suatu benda yang dipajang akan menghadirkan suasana tenang bagi kita. Suasana ini cocok untuk stress release bagi kita yang lelah dengan hiruk pikuk aktivitas sehari-hari. Di museum juga biasanya ada spot-spot foto yang menarik yang akan menambah koleksi foto kita di media sosial.

c. Kontemplasi Lintas Waktu

Waktu memang tidak bisa diulang, namun dengan mengunjungi museum kita bisa menyaksikan peristiwa atau penggalan-penggalan kisah yang terjadi di masa lalu. Misalnya kita akan melihat dengan mata kepala sendiri adanya bukti otentik sejarah yang biasanya ditemukan di museum sasmitaloka. Atau kita bisa melihat kerangka hewan, ataupun fosil di museum-museum purbakala.

d. Pengalaman Unik

Dengan berkunjung ke museum, kita juga dapat merasakan pengalaman unik membuat suatu benda seni. Misalnya saat berkunjung ke museum layang-layang atau museum batik, disediakan workshop khusus bagi yang ingin mencoba membuat layang-layang atau membatik menggunakan kain dan malam yang sudah disediakan.



Liburan saat pandemi

Sumber: unsplash.com

2. Mengunjungi Perpustakaan

Berkunjung ke perpustakaan adalah aktivitas yang seru untuk dilakukan di masa pandemi. Perpustakaan saat ini telah banyak menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanannya sehingga pengunjung pun merasa aman. Beberapa perpustakaan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung, screening suhu tubuh, dan sistem peminjaman dan pengembalian buku yang meminimalisir kontak langsung.

Kita juga bisa mengajak anak untuk berkunjung ke perpustakaan untuk menanamkan minat baca kepada anak. Banyak perpustakaan juga telah menyediakan fasilitas khusus untuk anak berupa ruangan, koleksi buku, dan fasilitas lain yang pastinya menyenangkan untuk anak-anak dalam berinteraksi dengan buku.

Beberapa perpustakaan yang menyediakan fasilitas untuk anak antara lain Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, tepatnya di lantai 7. Ruangan koleksi anak didesain sangat ceria dan menarik. Koleksi yang disajikan pun beragam, mulai dari ensiklopedia, buku bertema bahasa sampai agama.

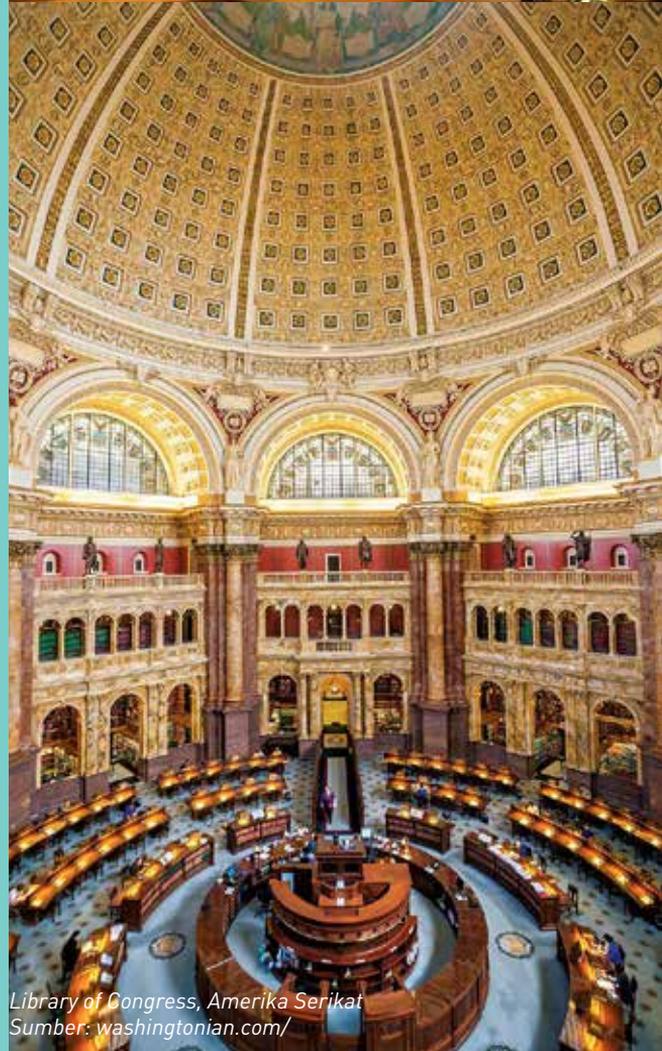
Sementara di seberang ruang koleksi anak ada area koleksi untuk kaum disabilitas dan lansia. Koleksi yang disajikan antara lain adalah buku-buku dengan huruf braille. Selain itu di tempat ini juga disediakan alat pembesar untuk para lansia yang membaca buku.

Untuk area Jakarta, perpustakaan dengan koleksi anak lainnya yang patut dikunjungi antara lain: Perpustakaan Umum DKI Jakarta Cikini, Rimba Baca Cilandak, Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain. Selain Perpustakaan Nasional, juga tersedia Perpustakaan Umum di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota yang bisa kita jelajahi koleksi-koleksinya.

(Mutri Batul Aini)



*Klementinum Library di Praha, Republik Ceko
Sumber: bluesyemre.com*



*Library of Congress, Amerika Serikat
Sumber: washingtonian.com/*

Persembahan Generasi Muda BPIW dalam rangka Hari Bakti PUPR ke 76



3 Desember

Lirik : Doedoeng Zenal Arifin

Aransemen : Tommy Aramanda, Hetty Debbie

Tiga Desember 45

Hari bakti PUPR

Inspirasi dari pahlawan Sapta Taruna

Tak surut berbakti

Walaupun hayatmu kau korbakan
Sapta Taruna kesuma bangsa
Dibumi Indonesia penerus Sapta Taruna
Baktimu pada Pertiwi

Bangun Negeri
Dari Sabang sampai Papua
Tak surut mengabdikan
Walaupun sribu rintangan
Sapta Taruna selalu sigap
Membangun negeri



Kiprah Sapta Taruna

Lirik : Doedoeng Zenal Arifin

Aransemen : Tommy Aramanda, Hendara Putera,
Hetty Debbie, Briyan Asmara, Rachman Hanifa

Semburan air di ledeng

Awali pagi ceria

Jalanan mulus beraspal

Hantarkan kami untuk bekerja

Bendungan dan irigasi
Pastikan daulat pangan
Rumah kokoh nyaman
Fondasi keluarga bahagia

Ayoo para Sapta Taruna
Kita bangun Indonesia
Jaga rawat lestarian

Infrastruktur yang kita bina
Program Nawacita
Pedoman kita membangun bangsa

Disparitas Timur Barat
Akan tinggal ceritera
Seluruh rakyat menunggu
Kiprah Sapta Taruna



PESONA WISATA TIGA GILI LOMBOK

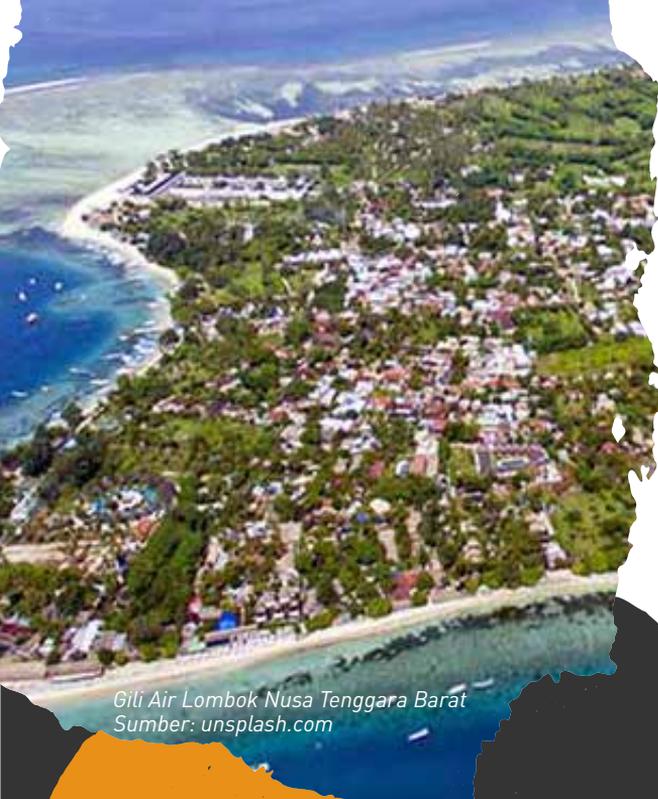
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki banyak destinasi wisata. Dari sejumlah obyek wisata tersebut, ada tiga Gili yang sudah terkenal dengan keindahan alamnya, yakni Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Ketiga Gili ini seakan mampu mewakili keindahan pantai-pantai yang ada di Lombok.

Hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Lombok menyempatkan waktu untuk mengunjungi Tiga Gili ini. Aktivitas yang dapat dilakukan di tiga pulau tersebut antara lain berenang, berlayar, diving, memancing, selancar, snorkeling, dan trekking. Untuk menuju ke destinasi wisata tersebut dapat melalui berbagai arah.

Bila dari Jakarta, maka terlebih dahulu ke Lombok dengan menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat selama dua jam. Wisata di tiga Gili ini menjadi alternatif liburan, saat dibuka kembali oleh pemerintah, setelah sempat ditutup akibat pandemi Covid 19. Berikut ulasan kawasan wisata yang menjadi ikon wisata Lombok saat ini.

*Lombok Nusa Tenggara Barat
Sumber: unsplash.com*





Gili Air Lombok Nusa Tenggara Barat
Sumber: unsplash.com

GILI AIR

Banyaknya obyek wisata Lombok mendorong popularitas ketiga Gili Air. Apalagi Gili Air paling dekat dengan Pulau Lombok. Wisatawan nasional maupun internasional yang datang melalui Bandara Lombok, dapat menuju Gili Air dengan menempuh perjalanan darat sekitar 49,5 km dan total waktu perjalanan yang dibutuhkan sekitar 1 jam hingga 2 jam. Bila Anda mau ke Gili Air tidak bisa bawa mobil langsung, tapi Anda harus parkir di bangsal atau Teluk Nare (nama pelabuhan di Lombok utara), dan kemudian Anda dapat menyeberang menggunakan boat ke Gili Air.

Dibandingkan kedua Gili di atas, Gili Air adalah Gili yang paling cocok untuk Anda yang berlibur bersama keluarga. Selain lokasinya yang paling dekat, di Gili ini juga fasilitas umum sudah memadai. Anda tidak perlu memikirkan masalah transportasi, makan, dan bahkan hiburan. Karena lokasinya paling dekat dengan Pulau Lombok, maka tidak heran jika Gili Air menjadi Gili yang paling banyak didatangi wisatawan.

Berkunjung ke Gili Air wisatawan dapat menjelajahi beberapa titik untuk menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia. Diantaranya pengunjung dapat melihat spot kuda laut, kura-kura, beragam ikan dengan berbagai warna, serta keanekaragaman penghuni laut lainnya. Masyarakat setempat menyebut Gili Air dengan nama "Tengah Aiq" yang berarti ditengah-tengah laut. Mayoritas penduduk asli Gili Air berasal dari suku bugis dan suku sasak, dan mereka bermata pencaharian utama sebagai nelayan, pedagang, dan pemandu wisata.

GILI MENO

Pulau kedua atau Gili kedua adalah Gili Meno. Gili ini terletak di antara Gili Trawangan dan Gili Air. Gili ini adalah Gili yang terkecil dibandingkan kedua Gili lainnya. Tidak hanya kecil, Gili Meno juga paling sepi dibandingkan yang lainnya. Meskipun begitu, Gili Meno dihuni oleh penduduk lokal, meskipun jumlah jiwanya hanya sekitar 400 jiwa saja. Kendaraan masih jarang ditemukan di Gili Meno.

Jika berangkat dari Kota Mataram, Anda harus menuju pelabuhan Bangsal di kawasan Pemenang. Bisa menggunakan rute Mataram-Senggigi-Pemenang dengan durasi berkendara sekitar satu jam. Bisa juga menggunakan rute Mataram-Pusuk-Pemenang, durasi perjalanan lebih singkat, yakni sekitar 45 menit.

Di pelabuhan Bangsal, ada dua opsi kapal, kapal umum dan kapal cepat (fast boat). Jika memilih kapal umum, biaya tiketnya berkisar Rp 15.000- 25.000. Jadwal keberangkatannya adalah pukul 10.00, 14.00, dan 17.00. Waktu menyeberang sekitar 30 menit. Jika mengunjungi Gili Meno, hal yang paling harus anda lakukan adalah berkeliling pulau, sembari mempelajari budaya lokal dan perkampungan asli Gili Meno.

Meskipun kecil, Pantai di Gili Meno merupakan pantai yang alami dan indah. Satu yang paling khas dari pulau ini adalah Meno Wall. Di sini juga ada penangkaran burung dan penyu. Selain itu ada spot untuk melakukan diving dan dijamin anda tidak akan bosan seharian ada di Gili Meno.



Gili Meno Lombok Nusa Tenggara Barat
Sumber: unsplash.com



Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat
Sumber: unsplash.com

GILI TRAWANGAN

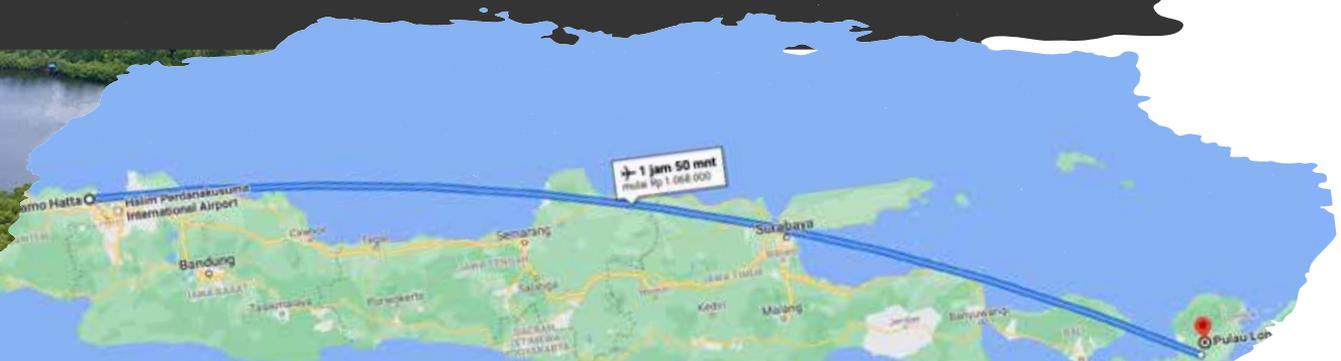
Gili Trawangan adalah Pulau terbesar dari ketiga Gili itu. Meskipun lokasinya paling jauh dari Pulau utama Lombok, namun Gili Trawangan yang paling ramai dikunjungi dibandingkan kedua Gili lainnya. Kebanyakan wisatawan terutama mancanegara yang mengunjungi Gili Trawangan adalah kaum muda.

Bila dari bandara Lombok, maka perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nara untuk menyewa perahu menuju Gili Trawangan. Namun bisa juga naik perahu dari Padang Bai, Tanjung Benoa, Pulau Serangan, hingga Sanur, Bali.

Pada hari-hari tertentu, ada sajian pesta yang diadakan di Gili Trawangan, dengan lantunan musik sepanjang malam. Didukung dengan panorama alam yang sangat luar biasa indah, tentu saja hal ini menjadikan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata yang sangat layak untuk dikunjungi.

Untuk Anda yang hanya ingin sekedar menikmati suasana pantai dan keindahan Gili Trawangan, di sini juga terdapat hotel dan penginapan yang tertata dengan baik. Bahkan jika berminat Anda bisa menyewa kereta kuda untuk berkeliling atau dengan menggunakan sepeda. Penggunaan kendaraan bermotor tak diperbolehkan di Gili Trawangan. Oleh karenanya kereta kuda dan sepeda merupakan alat transportasi yang dapat dipergunakan untuk menjelajahi keindahan alam di Gili Trawangan.

Bagaimana?, mana yang akan Anda kunjungi, ketiga-tiganya atau satu dari tiga Gili itu?. Silahkan menentukan pilihan. Dijamin, dengan mengunjungi kawasan wisata tersebut, akan menghilangkan kepenatan dari dunia kerja Anda. **(Hendra/dari berbagai sumber)**





Kamus Istilah Pengembangan Wilayah

Kamus istilah ini merupakan kompilasi istilah atau terminologi yang sering digunakan dalam teori, praktik, maupun kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia.

Selengkapnya
Cek QR!



Selamat

76TH

BAKTI PUPR

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3 Desember 2021



BIDIK LENSA

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air. Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman.

Pada rubrik Bidik Lensa edisi ini memotret pembangunan infrastruktur sektor konektivitas yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing serta tercapainya konektivitas antar wilayah. Berikut beberapa infrastruktur PUPR unggulan yang selesai dibangun Kementerian PUPR pada tahun 2021.*



Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika di Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah rampung November 2021. Jalan Bypass BIL- Mandalika sepanjang 17,3 km tersebut dibangun oleh Kementerian PUPR sebagai infrastruktur penunjang KSPN Mandalika.





Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren (Ponpes) Modern IMMIM di Kabupaten Maros yang sudah tuntas dibangun diresmikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Senin (22/11/2021). Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berupa rusun ini komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).



Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan siap dimanfaatkan masyarakat setelah Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan tersebut, Selasa (23/11/2021). Keberadaan Bendungan Karalloe diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani di Sulawesi Selatan khususnya di Gowa dan Jeneponto.



Puncak Waringin, salah satu spot pariwisata unggulan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Puncak Waringin yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo ini dibangun dengan tujuan sebagai creative hub dan pusat souvenir yang mengusung kearifan lokal.



Pesan Pembaca



Ahmad Fauzi
Jakarta

Dukungan Infrastruktur untuk Pengembangan Pariwisata Perlu Pendekatan Bottom Up dan Inclusive

Usaha pemerintah dalam mendukung geliat sektor pariwisata pasca Pandemi COVID-19 patut di apresiasi, hal ini terbukti melalui kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang. Dukungan pengembangan 5 KSPN/DPSP terus dilanjutkan pada tahun 2021.

Dengan peran sentral BPIW Kementerian PUPR dalam menangani dukungan infrastruktur bagi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi sangat penting. Pengembangan KSPN dengan pendekatan top down approach, dikhawatirkan akan memunculkan eksklusifitas bagi masyarakat lokal. Alangkah baiknya jika dukungan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata juga dikembang dengan pendekatan bottom up dan inclusive, dimana masyarakat lokal turut dilibatkan, turut didengar masukannya, dan juga diberdayakan. Dengan begitu, pengembangan pariwisata di Indonesia, kedepannya mampu memberikan dampak seluas-luasnya, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal.

Dimas Amarta
Pontianak

Saya sangat mengapresiasi upaya Kementerian PUPR mempercepat pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan. Hal tersebut menjadi bagian pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan untuk memperkuat negara serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan pemerataan pembangunan di Wilayah Barat Indonesia. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat menuju kawasan perekonomian, diharapkan dapat membangkitkan jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Bagi sahabat Sinergi yang ingin menyampaikan saran dan masukan dapat di kirim ke email hkkompu.bpiw@pu.go.id atau Whatsapp **0838-0874-7276**

**CEGAH
COVID-19**

**BARENG
PAK BAS**

PAKAI MASKER
DENGAN BENAR

BAWA ALAT
MAKAN PRIBADI

AYO
JAGA JARAK

ASUPAN GIZI
HARUS DIJAGA

KURANGI PERGI
KE TEMPAT RAMAI

SERING
CUCI TANGAN
DENGAN SABUN



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110



BPIW Call / WA Center

0838-0874-7276

 @pupr_bpiw

 @pupr_bpiw

 PUPR_BPIW

 Facebook fanpage : BPIW Kementerian PUPR



www.bpiw.pu.go.id